



2023

LAPORAN KINERJA

BKPSDM KABUPATEN LAMANDAU



(0532) 2071093



www.bkpsdmlamandau.com



Jalan W.R. Supratman No. 051



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena limpah berkat dan anugerahNya, maka penyusunan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Laporan ini adalah bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam melaksanakan *good governance* di lingkungan BKPSDM Kabupaten Lamandau, yang mengemban amanah menjalankan urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang kepegawaian. Laporan Kinerja ini selain berfungsi sebagai alat kendali juga menjadi instrumen penilai kualitas kinerja serta media pertanggungjawaban kepada publik. Melalui laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BKPSDM selama 1 (satu) tahun yang akan menjadi sumber informasi dan referensi untuk bahan penyusunan perencanaan, perbaikan dan peningkatan kinerja pada waktu yang akan datang.

Kami menyadari Laporan Kinerja ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak guna penyempurnaannya. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama dengan baik dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau.



Maha Bulik, Januari 2024
Kepala BKPSDM Kabupaten Lamandau,

KAMINI ANTHUS

Pembina Utama Muda

NIP. 19800612 200312 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	7
1.3. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi	7
1.4. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	17
1.5. Landasan Hukum	19
1.6. Sistematika Penulisan	20
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 21
2.1. Rencana Strategis 2018 - 2023	21
2.2. Perencanaan Kinerja	27
2.3. Perjanjian Kinerja	48
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 49
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	49
3.2. Realisasi Anggaran	82
 BAB IV PENUTUP	 86
4.1. Kesimpulan	86
4.2. Saran	86
 LAMPIRAN	 88

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pegawai BKPSDM berdasarkan Jabatan	12
Tabel 1.2	Keadaan Sarana dan Prasarana BKPSDM	13
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Strategis	23
Tabel 2.2	Rencana Kinerja Tahunan	28
Tabel 3.1	Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini	50
Tabel 3.2	Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023	53
Tabel 3.3	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	56
Tabel 3.4	Perbandingan realisasi kinerja tahun berjalan dengan target jangka menengah	58
Tabel 3.5	Tingkat Efisien dan Efektivitas Kinerja Tahun Anggaran 2023 .	65
Tabel 3.6	Penyerapan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Tercapainya Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	66
Tabel 3.7	Penyerapan Anggaran Tahun 2023	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi	10
Gambar 1.2	Pegawai berdasarkan Golongan/ruang	11
Gambar 1.3	Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan	11
Gambar 1.4	Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin	12

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi demi terselenggaranya *good governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Dari hasil pengukuran pencapaian kinerja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau dalam pelaksanaan tugasnya secara umum simpulan keberhasilan capaian kinerja BKPSDM Kabupaten Lamandau Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama ditetapkan sebanyak 4 indikator yang selajutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023, dimana BKPSDM Kabupaten Lamandau mendapatkan kategori **Sangat Berhasil** dengan rata-rata tingkat capaian sebesar **111,47%**. Hal ini tidak lepas dari peran dan komitmen semua unsur yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau, baik dari staf sampai dengan top manajer, untuk bekerja dengan semaksimal mungkin dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau.
2. Pada Tahun Anggaran 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau melaksanakan 3 Program 12 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 6.671.218.581,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.541.474.946,- atau 98,06%.

Melihat realisasi rata-rata tingkat capaian dari indikator kinerja utama sebesar 111,47%, dengan realisasi anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan BKPSDM tahun 2023 sebesar 98,06%, maka terdapat efisiensi anggaran.

3. Secara Umum kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau dalam pencapaian sasaran strategis telah

berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau Tahun 2023 masuk dalam kategori Sangat Berhasil.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Salah satu tolak ukur dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu dapat dipertanggungjawabkan capaian melalui mekanisme akuntabilitas publik.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dengan demikian suatu sistem akuntabilitas yang baik akan menciptakan suatu instansi pemerintahan yang efektif, efisien, responsif dalam meningkatkan kinerjanya.

Kebijakan terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan telah bersih dan benar-benar berpihak kepada kepentingan publik, sehingga dalam rangka mewujudkan hal tersebut mana disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategi instansi.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lamandau selaku unsur pembantu pimpinan daerah, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan kualitas kinerja khususnya dalam memberikan pelayanan, baik dalam kerangka perwujudan kesejahteraan pegawai maupun peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur. BKPSDM Kabupaten Lamandau harus mampu meningkatkan peran serta fungsi sebagai Lembaga Teknis Daerah berbentuk badan yang merupakan unsur staf yang menyelenggarakan fungsi-fungsi administratif sekaligus menyusun konsep-konsep, gagasan-gagasan dan terobosan-terobosan di bidang kepegawaian sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diemban, harus mampu mewujudkan pengelolaan manajemen kepegawaian dari mulai pengadaan sampai dengan pemberhentian pegawai secara optimal dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia (SDM) aparatur sebagai motor penggerak sistem organisasi pemerintahan Kabupaten Lamandau dalam mewujudkan visi.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lamandau Tahun 2023 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh BKPSDM Kabupaten Lamandau;
2. Mendorong BKPSDM Kabupaten Lamandau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BKPSDM Kabupaten Lamandau untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Lamandau terhadap BKPSDM Kabupaten Lamandau dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan, pengelolaan, dan pembinaan bidang kepegawaian.

1.1.1. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma *Performance Based Organization* (organisasi berbasis kinerja), maka setiap perangkat daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, tujuan dan sasaran pembangunan. Cascading Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau merupakan bentuk keseriusan dalam upaya peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2023. Sehingga kedepannya dalam melaksanakan program dan kegiatan harus berdasarkan kinerja yang berorientasi kepada hasil yang dapat dipertanggungjawabkan bagi kesejahteraan sumber daya aparatur.

CASCADING

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		PROGRAM			KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN					
SASARAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	NAMA SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR
Mewujudkan sumber daya aparatur yang kompeten dan profesional dalam peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik	Indeks Profesionalitas ASN	Meningkatkan kualitas SDM ASN	Persentase ASN yang mengikuti Diklat dan Lulus dengan predikat memuaskan	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jenjang dan kebutuhan	Persentase PNS yang memiliki kesesuaian dengan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	Pengembangan Kompetensi Teknis	Terpenuhinya Kebutuhan pengembangan kompetensi teknis bagi ASN	Persentase kebutuhan pengembangan kompetensi teknis bagi ASN yang terpenuhi	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Diklat Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		PROGRAM			KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN					
SASARAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	NAMA SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR
							Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terpenuhinya kebutuhan diklat pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Persentase PNS yang lulus mengikuti diklat pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terlaksananya kegiatan diklat pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		PROGRAM			KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN					
SASARAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	NAMA SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR
		Meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian	Persentase aparatur yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrator yang sesuai standar kompetensi jabatan	Program Kepegawaian Daerah	Terpenuhinya kebutuhan dokumen kepegawaian	Persentase dokumen kepegawaian yang dikeluarkan tepat waktu	Mutasi dan Promosi ASN	Tercapainya penetapan keputusan dokumen administrasi kepegawaian	Jumlah Penetapan Keputusan Dokumen Administrasi Kepegawaian	Pengelolaan Mutasi ASN	Terselesaikannya proses mutasi aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah
										Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terselesaikannya proses kenaikan pangkat aparatur	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
										Pengelolaan Promosi ASN	Terpenuhinya penempatan pejabat sesuai bidang dan kompetensinya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		PROGRAM			KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN					
SASARAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	NAMA SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR
			Persentase tingkat layanan administrasi kepegawaian				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Tercapainya Penetapan dan Update dokumen kepegawaian	Jumlah Penetapan dan Update Dokumen Kepegawaian	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Tercapainya Penetapan dan Update dokumen kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
										Pengelolaan Data Kepegawaian	Tersedianya Data Kepegawaian yang lengkap dan akurat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian
							Pengembangan Kompetensi ASN	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berkompeten	Persentase pemberian bantuan pendidikan bagi PNS Tugas Belajar yang terpenuhi	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terpenuhinya kebutuhan pendidikan aparatur	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan
							Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terwujudnya Sumber daya Aparatur yang berkinerja dan Disiplin	Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja dan pelanggaran disiplin	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tersusunnya dokumen penilaian kinerja aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
										Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terselesaikannya kasus pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini merupakan informasi pertanggungjawaban Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau periode 2018 – 2023.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah yaitu :

1. Untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau tahun 2023;
2. Sebagai bahan evaluasi/penilaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
3. Sebagai acuan dan bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana program/kegiatan tahunan untuk tahun anggaran 2024 yang akan datang.

1.3. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

1.3.1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi

1.3.2.1. Tugas Pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau

Tugas Pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau adalah menyusun dan penyelenggaraan kebijakan daerah bidang pembinaan kepegawaian, pengelolaan administrasi kepegawaian, mutasi pegawai, pengembangan, penghargaan aparatur dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia aparatur di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan

daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3.2.2. Fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Lamandau mempunyai fungsi :

1. Perumusan bahan pembinaan dan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia ;
2. Pembina kepegawaian dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
3. Pelaksanaan Penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian, sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
4. Pengoordinasi pelaksanaan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai;
5. Pelaksanaan pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
6. Penyusun kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia.
7. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi aparatur dilingkungan pemerintah.
8. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi dilingkungan pemerintah.
9. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur
10. Melaksanakan koordinasi dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.
11. Pelaksanaan administrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

1.3.3. Struktur Organisasi

BKPSDM Kabupaten Lamandau terdiri dari Kepala Badan, 1 (Satu) sekretariat dan 2 (Dua) bidang pelayanan teknis.

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pembinaan, pengoordinasian, perencanaan serta penetapan program kerja, tata kerja dan pengembangan semua kegiatan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia serta

bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pelaksanaan koordinasi pengendalian serta bimbingan dalam penyusunan program, administrasi dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kesekretariatan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi, tata laksana, dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh 2 (Dua) Sub Bagian, yaitu :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan, mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada subbagian umum dan kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana program, kegiatan dan rencana kerja anggaran serta menyiapkan laporan melaksanakan kegiatan dan pengelolaan, pengendalian keuangan, analisis dan realisasi dan pembukuan, administrasi perbendaharaan serta melakukan pengelolaan sarana, perbekalan, perlengkapan, pengendalian melaksanakan rencana kebutuhan.

3. Bidang Mutasi

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, yang mempunyai tugas penyusunan formasi ASN, pengkoordinasian tentang formasi ASN baik mengenai kepangkatan maupun jabatan, formasi pengadaan calon ASN dan pelaksanaan seleksi dalam rangka pengadaan ASN, pengkoordinasian tentang mutasi ASN, menghimpun pelaksanaan koordinasi dan perumusan kebijakan teknis kegiatan pengembangan aparatur dan informasi kepegawaian.

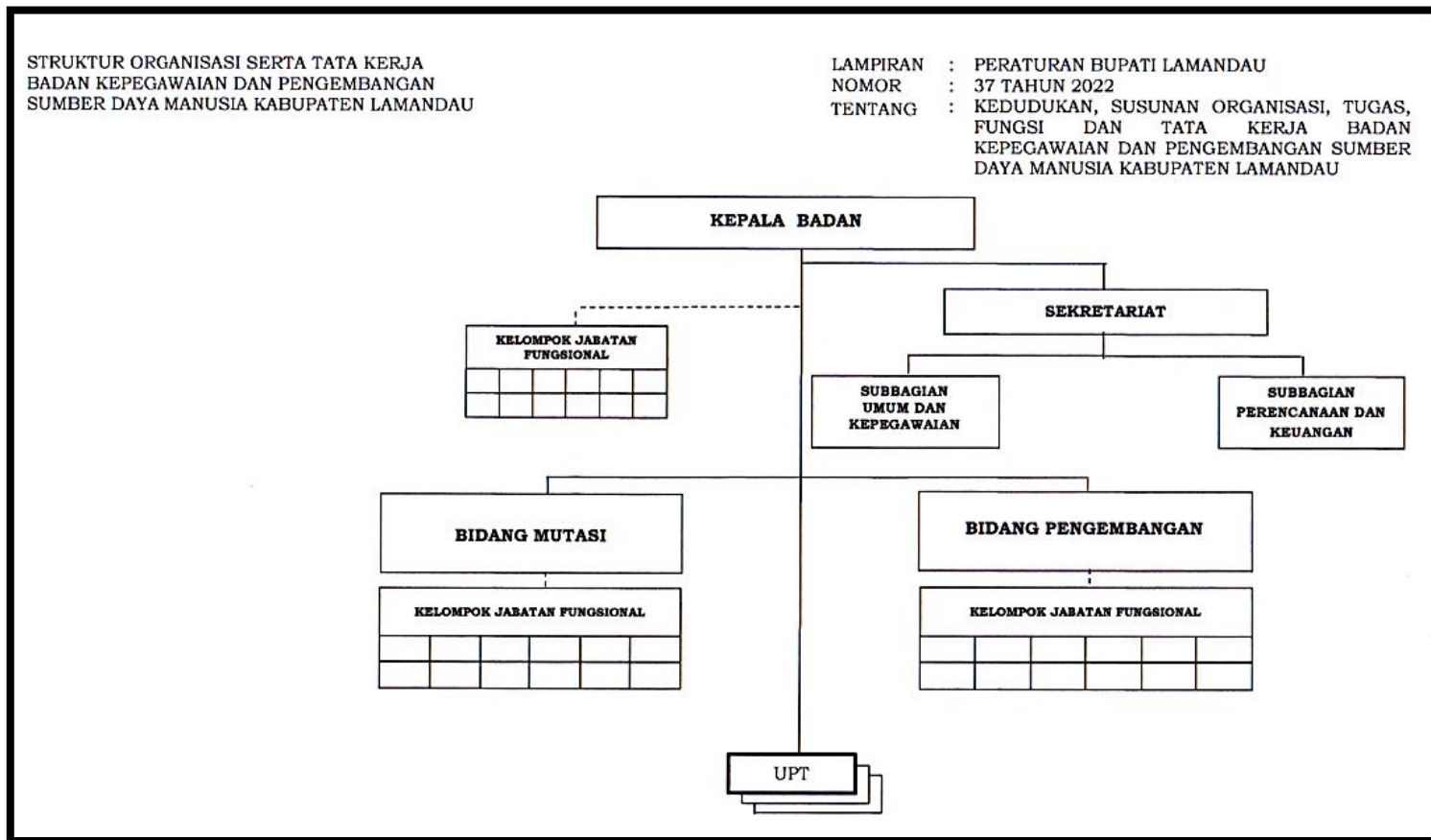
4. Bidang Pengembangan

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, yang mempunyai tugas perencanaan dan perumusan penilaian kinerja dan penghargaan ASN, perencanaan kebutuhan pengembangan sumber daya ASN serta perencanaan dan melaksanakan pembinaan aparatur

5. Unit Pelaksana Teknis

6. Kelompok Jabatan Fungsional

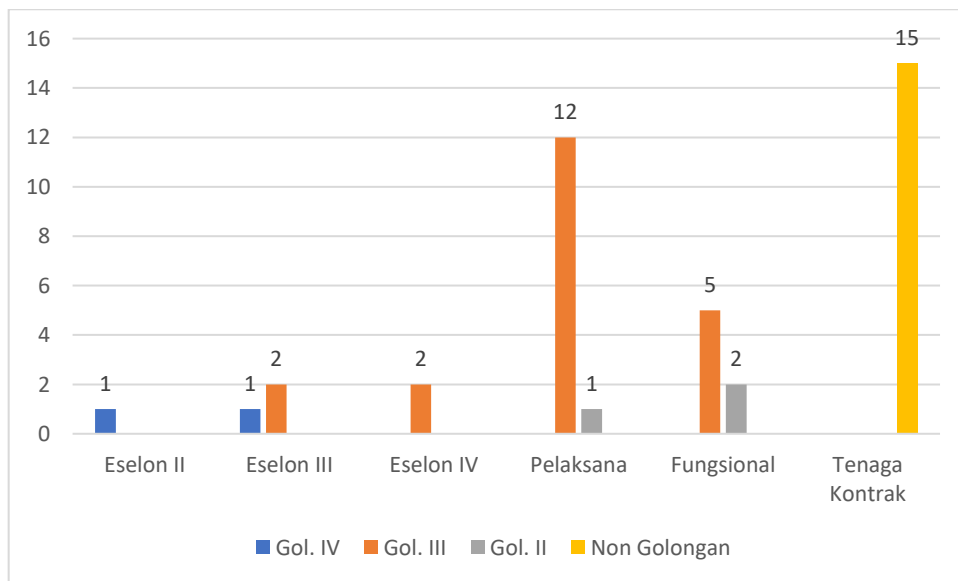
Gambar 1.1
SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN LAMANDAU



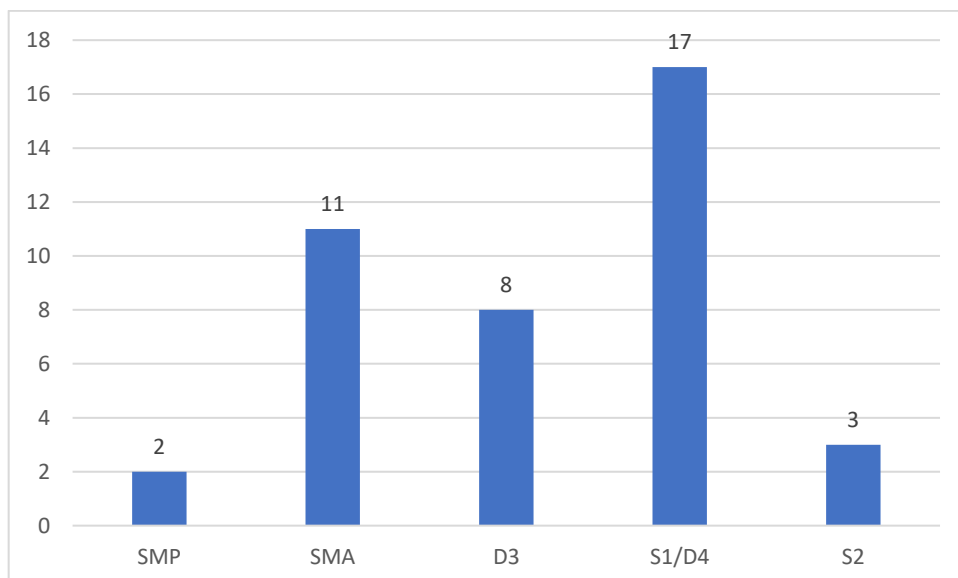
1.3.4. Sumber Daya Organisasi

1.3.4.1. Sumber Daya Manusia

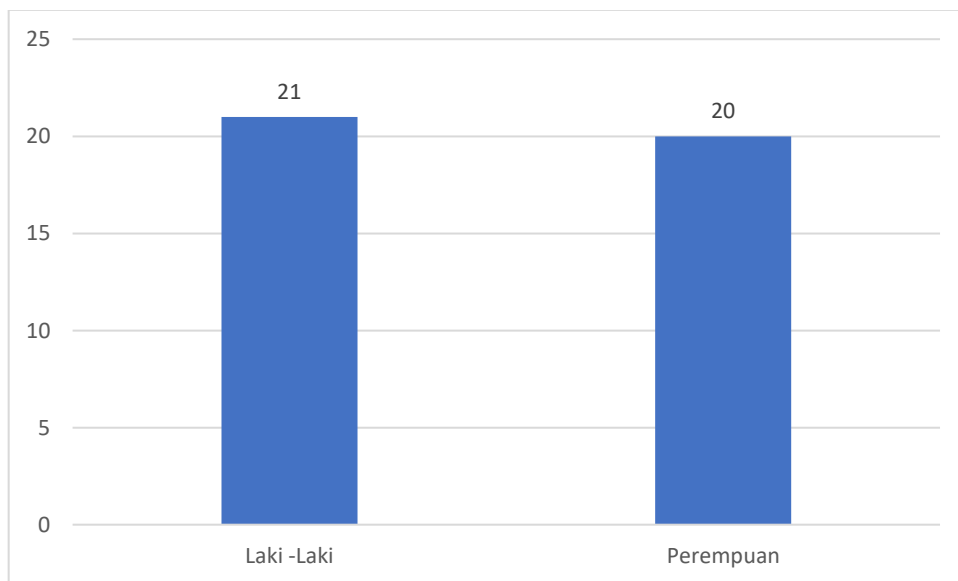
Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau sesuai struktur organisasi yang ditetapkan, didukung dengan jumlah pegawai per 31 Desember 2023 sebanyak 41 personil dengan komposisi sebagai berikut :



Gambar 1.2 Pegawai berdasarkan Golongan



Gambar 1.3 Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 1.4 Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.1 Pegawai berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH PEGAWAI
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	KEPALA BADAN	1 Orang	-	1 Orang
2.	SEKRETARIS	1 Orang	-	1 Orang
3.	KEPALA BIDANG	2 Orang	-	2 Orang
4.	KEPALA SUB BAGIAN	-	2 Orang	2 Orang
5.	FUNGSIONAL TERTENTU	3 Orang	4 Orang	7 Orang
6.	PELAKSANA	7 Orang	6 Orang	13 Orang
7.	TENAGA KONTRAK	7 Orang	8 Orang	15 Orang
JUMLAH				41 Orang

1.3.4.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki dan digunakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau untuk menunjang pelayanan dan pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 Keadaan Sarana dan Prasarana BKPSDM

No	Nama Barang	Jumlah Aset Yg Dimiliki (Rp)		Keterangan	Jumlah Aset Yg Tidak Dipakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp		Unit	Rp	
1	Tanah bangunan kantor pemerintah	1	976.965.000		0	0	
2	Tanah bangunan pendidikan dan latihan	1	163.302.480		0	0	
3	Electric generating set lainnya (dst)	1	171.000.000		0	0	
4	Kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1	280.060.000	Innova 1431	0	0	
5	Kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1	421.850.000	Hilux	0	0	
6	Mini bus (penumpang 14 orang kebawah)	1	225.000.000	Innova 14	1	225.000.000	Rusak Berat
7	Kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1	345.850.000	Triton	1	345.850.000	Rusak Berat
8	Sepeda motor	18	291.368.800		0	0	
9	Mesin ketik manual portable	11	25.247.000		11	25.247.000	Kurang Baik
10	Mesin penghitung uang	1	3.300.000		1	3.300.000	Kurang Baik
11	Lemari besi/metal	18	50.685.000		0	0	
12	Lemari kayu	3	8.100.000		0	0	
13	Rak besi	2	4.860.000		2	4.860.000	Kurang Baik
14	Rak kayu	15	14.050.000		2	1.873.333	Rusak Berat
15	Filing cabinet besi	25	55.012.000		5	11.002.400	Rusak Berat
16	Brandkas	1	8.415.000		0	0	
17	White board	4	4.481.100		4	4.481.100	Kurang Baik
18	Mesin absensi	1	7.300.000		0	0	
19	Papan nama instansi	1	10.437.000		0	0	
20	Alat kantor lainnya	4	141.280.000		0	0	

No	Nama Barang	Jumlah Aset Yg Dimiliki (Rp)		Keterangan	Jumlah Aset Yg Tidak Dipakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp		Unit	Rp	
21	Meja rapat	14	20.370.000		0	0	
22	Meja podium	2	7.000.000		0	0	
23	Meja panjang	2	6.000.000		0	0	
24	Meja 1/2 biro	3	7.950.000		0	0	
25	Kursi tamu	3	16.700.000		0	0	
26	Kursi putar	10	10.000.000		0	0	
27	Kursi biasa	50	30.000.000		0	0	
28	Kursi lipat	360	140.432.500		50	19.504.514	Rusak Berat
29	Meja komputer	55	22.300.000		0	0	
30	Sofa	7	43.770.000		1	6.252.857	Rusak Berat
31	Meubeler lainnya	20	48.620.000		0	0	
32	Mesin pemotong rumput	4	11.970.000		1	2.992.500	Rusak Berat
33	Lemari es	1	2.500.000		0	0	
34	A.C. Split	51	410.513.500		5	40.246.422	Rusak Berat
35	Kipas angin	10	25.990.000		4	10.396.000	Rusak Berat
36	Treng air/tandon air	1	2.000.000		0	0	
37	Televisi	5	49.558.500		0	0	
38	Sound system	1	9.900.000		0	0	
39	Wireless	7	32.240.000		1	4.605.714	Kurang Baik
40	Microphone	4	5.200.000		0	0	
41	Microphone table stand	1	9.468.003		0	0	
42	Unit power supply	5	86.917.600		0	0	
43	Camera film	3	26.453.500		0	0	
44	Timbangan barang	1	745.000		0	0	
45	Tangga aluminium	1	7.992.500		0	0	
46	Dispenser	17	8.170.000		5	2.402.941	Rusak Berat
47	Alat kantor lainnya	260	70.372.500		0	0	
48	Alat kantor lainnya	1	30.000.000	CCTV	0	0	
49	Gordyin/kray	2	94.975.000		0	0	
50	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	43.780.000		0	0	
51	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	162.916.000		0	0	

No	Nama Barang	Jumlah Aset Yg Dimiliki (Rp)		Keterangan	Jumlah Aset Yg Tidak Dipakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp		Unit	Rp	
52	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2	5.700.002	Soundcard	0	0	
53	Alat pemadam/portable	2	2.970.000		0	0	
54	Meja kerja pejabat eselon II	3	7.003.500		0	0	
55	Meja kerja pejabat eselon III	6	13.169.000		1	2.194.833	Rusak Berat
56	Meja kerja pejabat eselon IV	18	43.731.999		2	4.859.111	Rusak Berat
57	Meja kerja pegawai non struktural	44	59.819.999		2	2.719.090	Rusak Berat
58	Meja Rapat Pejabat lainnya	12	24.510.000		0	0	
59	Kursi kerja pejabat eselon II	10	20.550.876		4	2.055.088	Rusak Berat
60	Kursi kerja pejabat eselon III	7	13.040.000		1	1.862.857	Rusak Berat
61	Kursi kerja pejabat eselon IV	26	37.702.751		5	7.250.529	Rusak Berat
62	Kursi kerja pegawai non struktural	26	14.014.000		5	2.695.000	Rusak Berat
63	Professional sound system	1	69.300.000		0	0	
64	Layar film/projector	3	61.862.500		0	0	
65	Telephone (PABX)	1	25.620.000		0	0	
66	Pesawat telephone	9	2.500.000		9	0	
67	Telephone mobile	14	124.672.900		10	89.052.071	Kurang Baik
68	Facsimile	2	2.860.000		2	2.860.000	Rusak Berat
69	Mainframe (komputer jaringan)	1	50.058.902		0	0	
70	P.c unit	89	839.263.275		3	28.289.773	Rusak Berat
71	Lap top	30	348.592.500		5	58.098.750	Rusak Berat
72	Hard disk	11	11.480.000		0	0	
73	Peralatan mainframe lainnya (dst)	1	8.392.576		0	0	
74	Printer (peralatan personal komputer)	75	233.259.144		10	31.101.219	Rusak Berat
75	Scanner (peralatan personal komputer)	4	27.218.500		0	0	
76	Peralatan Personal Komputer lainnya	14	300.436.898		0	0	
77	Server	1	44.110.000		0	0	
78	Router/hub	1	43.090.300		0	0	

No	Nama Barang	Jumlah Aset Yg Dimiliki (Rp)		Keterangan	Jumlah Aset Yg Tidak Dipakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp		Unit	Rp	
79	Peralatan Jaringan lainnya	54	837.927.250		0	0	
80	Tenda	2	48.750.000		0	0	
81	Bangunan gedung kantor permanen	11	6.192.258.844		0	0	
82	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	1	317.400.000		0	0	
83	Bangunan gedung tempat ibadah permanen	1	304.068.000		0	0	
84	Bangunan gedung pertemuan permanen	1	800.280.000		0	0	
85	Bangunan gedung pendidikan permanen	1	1.187.400.000		0	0	
86	Gedung garasi/pool semi permanen	1	76.050.000		0	0	
87	Bangunan gedung tempat kerja lainnya permanen	1	585.850.000		0	0	
88	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	6	2.154.321.288		0	0	
89	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1	230.622.900		0	0	
90	Rumah negara golongan ii tipe c permanen	1	18.870.000		0	0	
91	Sumur resapan/pdam	2	13.702.450		0	0	
92	Instalasi penangkal petir manual	1	14.700.000		0	0	
93	Jaringan pembawa kapasitas kecil	1	11.825.000		0	0	
94	Jaringan distribusi tegangan diatas 20 kva	1	352.273.384		0	0	
95	Jaringan Distribusi Lain-lain	8	248.337.600		0	0	
96	Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain	2	39.260.250		0	0	
97	Buku Umum Lain-lain	89	22.849.200		0	0	

1.4. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

1.4.1. ASPEK STRATEGIS

Apabila melihat Struktur Organisasi dan fungsi yang diemban Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai peran dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau yang kompeten, berkinerja dan profesional melalui penyediaan pelayanan di bidang kepegawaian yang berkualitas.

Guna meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Lamandau, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau merespon dengan meningkatkan kualitas layanan bidang kepegawaian baik berupa penyempurnaan metode layanan dan juga digitalisasi layanan, misalnya peranan sistem *Computer Assited Test (CAT)* pada seleksi penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), Ujian Kedinasan serta Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Sejalan dengan semangat meningkatkan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi serta menghilangkan nepotisme dan potensi korupsi dan kolusi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menerapkan sistem pengusulan kenaikan pangkat *paperless*.

1.4.2. PERMASALAHAN UTAMA

Isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian berkenaan dengan pelaksanaan manajemen kepegawaian dapat diidentifikasi sebagai berikut “Belum Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang kompeten dan profesional dalam peningkatan kualitas pelayanan publik”. Hal ini berkaitan dengan beberapa permasalahan yang selama ini terjadi dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian di daerah antara lain :

1. Dalam rangka membangun keunggulan daerah, perlu kiranya dipersiapkan sumber daya manusia aparatur pelaksana pembangunan, yang siap menghadapi era globalisasi dan pasar bebas dan dapat mempersatukan kekuatan-kekuatan daerah menjadi kekuatan wilayah yang mempunyai daya saing tinggi. Sejalan dengan itu, pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah melahirkan banyak kemudahan dalam mengakses berbagai informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM di daerah.

2. Promosi PNS ke dalam jabatan struktural belum sepenuhnya didasarkan pada kinerja PNS.
3. Pendidikan dan Pelatihan khususnya Diklat PIM menjadi kurang bermakna apabila dikaitkan dengan promosi jabatan, dimana untuk menduduki jabatan bisa duduk dulu baru didik kemudian, sehingga bagi yang sudah dididik tapi belum menduduki jabatan akan mempengaruhi kinerja.
4. Beban kerja mayoritas PNS belum optimal karena porsi pekerjaan yang diselesaikan oleh PNS masih berada di bawah kapasitas optimal yang seharusnya. Terdapat pengangguran tidak kentara di lingkungan PNS kabupaten karena beban kerja PNS yang tidak sepadan dengan jumlah pegawai yang ada.
5. Kinerja dan disiplin PNS dirasakan masih kurang karena tingkat kesejahteraan pegawai yang relatif masih rendah dan pola karier yang tidak jelas
6. Kurang tersedianya dukungan dana untuk pelaksanaan diklat, baik diklat struktural, diklat kedinasan, diklat teknis fungsional dan diklat kemasyarakatan dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan publik.
7. Pengoptimalan sarana dan prasarana yang masih terus diperlukan sebagai penunjang pelayanan.
8. Mengoptimalkan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS oleh Tim Komisi Disiplin dalam rangka mewujudkan aparatur yang baik dan berkualitas.

1.5. LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Lamandau Tahun 2023 dengan memperhatikan pada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Laporan Kinerja , yaitu :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 230) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 198 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 245);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023;
6. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau;
7. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau tahun 2022 terdiri dari 4 (Empat) Bab yang dapat dilihat sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi
- 1.4. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama
- 1.5. Landasan Hukum
- 1.6. Sistematika Penulisan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis 2018-2023
- 2.2. Perencanaan Kinerja
- 2.3. Perjanjian Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Realisasi Anggaran

BAB IV : PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Saran

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau telah menetapkan dan menandatangani Perjanjian Kinerja dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Tahapan Perencanaan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau diawali dari penyusunan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 yang pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen mewujudkan sumber daya aparatur yang kompeten dan profesional dalam peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.

2.1 RENCANA STRATEGIS 2018-2023

Perencanaan Program dan Kegiatan dibuat berdasarkan isu strategis bidang pemerintahan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023 yaitu reformasi birokrasi yang bersifat melayani masyarakat. Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Lamandau menyusun rencana program dan kegiatan dalam rangka memberikan dukungan atas Misi Ke 1 (satu) yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN)”**. maka dirumuskan tujuan ke -1 dari Misi ke-1 yaitu *“Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis kinerja dan pelayanan publik”* dengan sasaran *“Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah.*

Sasaran misi tersebut diatas adalah meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah. Beberapa program yang mendukung pencapaian misi ini antara lain Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Pengelolaan Administrasi Aparatur.

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan, selanjutnya OPD menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 – 2023. Renstra merupakan suatu proses yang menyajikan rencana-rencana strategis organisasi dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis

dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis ini sebagai implementasi RPJMD di tingkat SKPD. Isu-isu strategis di tingkat OPD dianalisis untuk menemukan strategi yang efektif untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Pada tahap akhir pencapaian sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai hasil akhir (*outcome*) oleh pelaksana program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan organisasi. Perumusan tujuan Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Lamandau mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat komponen BKPSDM, memiliki orientasi kedepan sehingga mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

2.1.1. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka menentukan arah strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka dirumuskan ***tujuan dan sasaran*** organisasi sebagai berikut :

2.1.1.1. TUJUAN

“Mewujudkan sumber daya aparatur yang kompeten dan profesional dalam peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik”

Dengan diformulasikan tujuan Rencana Strategis diharapkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan tujuan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Secara garis besar tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada rencana strategis 5 (lima) tahun yang lalu dengan tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada rencana strategis untuk 5 (lima) tahun kedepan tidak banyak berubah. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau tetap berkonsentrasi pada tujuan mewujudkan aparatur yang baik, bersih, berkompeten, mampu bekerja dengan professional sehingga kinerja yang dihasilkan memiliki kualitas dan

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat benar-benar dirasakan dan berdampak positif. Yang membedakan adalah indikator dari tujuan. Dimana indikator tujuan BKPSDM untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah “Indeks Profesionalitas ASN”.

Dalam PERMENPAN RB Nomor 38 tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, yang dimaksud Profesi merupakan pekerjaan atau jabatan dalam hierarki birokrasi yang menuntut keahlian tertentu serta memiliki etika khusus pada jabatan tertentu. Adapun yang dimaksud Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Sedangkan Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugasnya.

2.1.1.2. SASARAN

Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui tindakan – tindakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan untuk mewujudkan tujuan tersebut yakni :

1. Meningkatkan kualitas SDM ASN
2. Meningkatkan kualitas administrasi kepegawaian

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Strategis

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I.	Mewujudkan sumber daya aparatur yang kompeten dan profesional dalam peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik		Indeks Profesionalitas ASN	0,55	0,52	55	58	61

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1)		Meningkatkan kualitas SDM ASN	Persentase aparatur yang menduduki jabatan struktural sesuai standar kompetensi jabatan	4.62%	9.25%	-	-	-
			Persentase ASN yang mengikuti Diklat dan Lulus dengan Predikat memuaskan	-	-	76%	78%	80%
2)		Meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian	Persentase Aparatur yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator yang sesuai Standar Kompetensi Jabatan	-	-	39,24%	60,75%	82,25%
			Persentase tingkat layanan administrasi kepegawaian	61,8%	77%	77%	80%	82%

2.1.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran dirumuskan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

2.1.2.1 PROGRAM

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu, saling terkait dan sinergis untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Secara garis besar Program pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2023 terbagi menjadi 3 (Tiga) Program , yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Kepegawaian Daerah
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

2.1.2.2 KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Kegiatan merupakan penjabaran dari program yang telah ditentukan. Sedangkan Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah. Di tahun 2023 terdapat 3 Program, 12 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Kepegawaian Daerah
 - a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
 - Pengelolaan Data Kepegawaian
 - b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
 - Pengelolaan Mutasi ASN
 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - Pengelolaan Promosi ASN
 - c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
 - d. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - a. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis
 - Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah Umum.
 - b. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
 - Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan

2.2 PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses perencanaan kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA), yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang : sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya Program, kegiatan, sub kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capainnya.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Rencana Kinerja Tahunan menggambarkan rencana kinerja pada tahun yang bersangkutan yang menyangkut kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun tersebut. Adapun Rencana kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
RENCANA KINERJA TAHUNAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN : 2023

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Unit Kerja SOPD/Bidang Penanggung Jawab	
								Tujuan/Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	2023				
												Satuan	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Mewujudkan sumber daya aparatur yang kompeten dan profesional dalam peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik								Indeks Profesionalitas ASN					Indeks	61		
	Meningkatkan kualitas SDM ASN							Persentase ASN yang mengikuti Diklat dan Lulus dengan predikat memuaskan					%	80		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Unit Kerja SOPD/Bidang Penanggung Jawab
								Tujuan/Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	2023			
												Satuan	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase PNS yang memiliki kesesuaian dengan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional			%	79	767.339.000	PENGEMBANGAN
		5	4	2	02.01		Pengembangan Kompetensi Teknis			Persentase kebutuhan pengembangan kompetensi teknis bagi ASN yang terpenuhi		Persen	100	197.086.000	PENGEMBANGAN

Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Unit Kerja SOPD/Bidang Penanggung Jawab
									Tujuan/Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	2023			
													Satuan	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5	4	2	02.01	4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Dokumen	4	197.086.000	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Unit Kerja SOPD/Bidang Penanggung Jawab
								Tujuan/Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	2023			
												Satuan	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5	4	2	02.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			Persentase PNS yang lulus mengikuti diklat pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional		%	100	570.253.000	PENGEMBANGAN
		5	4	2	02.02	8	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Dokumen	30	570.253.000	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Unit Kerja SOPD/Bidang Penanggung Jawab
								Tujuan/Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	2023			
												Satuan	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian							Persentase aparaturnya yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrator yang sesuai standar kompetensi jabatan				%	82,25		
								Persentase tingkat layanan administrasi kepegawaian				%	82		
		5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase dokumen kepegawaian yang dikeluarkan tepat waktu			%	77	1.505.357.924	MUTASI
		5	3	2	02.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			Jumlah Penetapan dan Update Dokumen Kepegawaian		Dokumen	1	229.710.108	MUTASI

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Unit Kerja SOPD/Bidang Penanggung Jawab
								Tujuan/Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	2023			
												Satuan	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5	3	2	02.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	25	115.379.384	
		5	3	2	02.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	2929	114.330.724	
		5	3	2	02.02		Mutasi dan Promosi ASN				Jumlah Penetapan Keputusan Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	661.362.092	MUTASI

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Unit Kerja SOPD/Bidang Penanggung Jawab
								Tujuan/Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	2023			
												Satuan	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5	3	2	02.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	50	46.672.000	
		5	3	2	02.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	300	73.761.248	
		5	3	2	02.02	3	Pengelolaan Promosi ASN				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	7	540.928.844	
		5	3	2	02.03		Pengembangan Kompetensi ASN			Persentase pemberian bantuan pendidikan bagi PNS Tugas Belajar yang terpenuhi		Persen	100	499.994.000	PENGEMBANGAN

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Unit Kerja SOPD/Bidang Penanggung Jawab
								Tujuan/Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	2023			
												Satuan	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5	3	2	02.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN				Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	21	499.994.000	
		5	3	2	02.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja dan pelanggaran disiplin		Dokumen	2	114.291.724	MUTASI
		5	3	2	02.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	2100	54.665.600	
		5	3	2	02.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	5	59.626.124	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Unit Kerja SOPD/Bidang Penanggung Jawab
								Tujuan/Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	2023			
												Satuan	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Daerah			%	100	4.398.521.657	SEKRETARIAT
		5	3	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN		Bulan	14	2.930.450.034	SEKRETARIAT
		5	3	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	30	2.930.450.034	
		5	3	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Persentase penunjang peningkatan disiplin dan kapasitas aparatur yang tersedia		Persen	100	180.913.820	SEKRETARIAT
		5	3	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	80.362.000	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Unit Kerja SOPD/Bidang Penanggung Jawab
								Tujuan/Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	2023			
												Satuan	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5	3	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	40	100.551.820	
		5	3	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Kebutuhan pelayanan administrasi umum yang tersedia		Persen	100	402.061.948	SEKRETARIAT
		5	3	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	25.714.576	
		5	3	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	114.096.128	
		5	3	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	26.535.000	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Unit Kerja SOPD/Bidang Penanggung Jawab
								Tujuan/Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	2023			
												Satuan	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5	3	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	27.774.244	
		5	3	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6	12.366.000	
		5	3	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	195.576.000	
		5	3	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang operasional perkantoran		Persen	100	199.304.000	SEKRETARIAT

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Unit Kerja SOPD/Bidang Penanggung Jawab
								Tujuan/Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	2023			
												Satuan	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5	3	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	108.310.000	
		5	3	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	90.994.000	
		5	3	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase penunjang operasional perkantoran yang tersedia		Persen	100	409.728.115	SEKRETARIAT
		5	3	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	6.250.000	
		5	3	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	187.355.328	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Unit Kerja SOPD/Bidang Penanggung Jawab
								Tujuan/Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	2023			
												Satuan	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5	3	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	216.122.787	
		5	3	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang tersedia		Persen	100	276.063.740	SEKRETARIAT
		5	3	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	88.980.000	
		5	3	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	3.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Unit Kerja SOPD/Bidang Penanggung Jawab
								Tujuan/Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	2023			
												Satuan	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5	3	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	Unit	1	115.379.100	
		5	3	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	Unit	80	68.704.640	
Total														6.671.218.581	

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

TAHUN : 2023

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Mewujudkan sumber daya aparatur yang kompeten dan profesional dalam peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik		Indeks profesionalitas ASN	61				
	Meningkatkan kualitas SDM ASN	Persentase ASN yang mengikuti Diklat dan Lulus dengan predikat memuaskan	80%	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS yang memiliki kesesuaian dengan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	79%	767.339.000
				Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase kebutuhan pengembangan kompetensi teknis bagi ASN yang terpenuhi	100%	197.086.000
				Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	4 Dokumen	197.086.000
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase PNS yang lulus mengikuti diklat pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	100%	570.253.000

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
				Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	30 Dokumen	570.253.000
	Meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian	Persentase aparatur yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrator yang sesuai standar kompetensi jabatan	82,25%	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase dokumen kepegawaian yang dikeluarkan tepat waktu	77%	1.505.357.924
		Persentase tingkat layanan administrasi kepegawaian	82%	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Penetapan dan Update Dokumen Kepegawaian	1 Dokumen	229.710.108
				Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	25 Dokumen	115.379.384
				Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2929 Dokumen	114.330.724

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
				Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Penetapan Keputusan Dokumen Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	661.362.092
				Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	50 Dokumen	46.672.000
				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	300 Dokumen	73.761.248
				Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	7 Dokumen	540.928.844
				Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase pemberian bantuan pendidikan bagi PNS Tugas Belajar yang terpenuhi	100 %	499.994.000
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	21 Orang	499.994.000
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja dan pelanggaran disiplin	2 Dokumen	114.291.724
				Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2100 Dokumen	54.665.600
				Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan	59.626.124

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100%	4.398.521.657
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	2.930.450.034
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	2.930.450.034
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penunjang peningkatan disiplin dan kapasitas aparatur yang tersedia	100%	180.913.820
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	80.362.000
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	100.551.820
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan pelayanan administrasi umum yang tersedia	100%	402.061.948
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.714.576
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	114.096.128
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	26.535.000

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	27.774.244
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	12.366.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	195.576.000
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang operasional perkantoran	100%	199.304.000
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	108.310.000
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	90.994.000
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang operasional perkantoran yang tersedia	100%	409.728.115
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	6.250.000

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	187.355.328
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	216.122.787
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang tersedia	100%	276.063.740
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	88.980.000
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	3.000.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	115.379.100
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80 Unit	68.704.640

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati sebagai pemberi amanah dan pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, wewenang dan sumber daya yang tersedia.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau pada tahun 2023 ini telah membuat Perjanjian Kinerja antara Kepala BKPSDM Kabupaten Lamandau dengan Bupati Lamandau, Kepala BKPSDM Kabupaten Lamandau dengan Sekretaris dan Kepala Bidang, serta Sekretaris dengan Kepala Sub Bagian.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Dalam rangka pengukuran kinerja, indikator yang digunakan adalah indikator sasaran strategis dan indikator kegiatan 2022. Indikator sasaran strategis adalah yang menggambarkan tingkat keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Indikator kinerja kegiatan terdiri dari indikator input, output dan outcome untuk setiap kegiatan. Selanjutnya setiap indikator kinerja ditetapkan satuan, target dan realisasinya. Dari perbandingan antara target dan realisasi tersebut dihasilkan capaian kinerja.

Pengukuran pencapaian kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi sebagai berikut :

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dipergunakan skala pengukuran sebagai berikut :

> 85	➤ Sangat Berhasil
70 < X ≤ 85	➤ Berhasil
55 < X ≤ 70	➤ Cukup Berhasil
≤ 55	➤ Tidak Berhasil

Dalam pengukuran pencapaian kinerja sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1 Membandingkan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Untuk mengukur capaian kinerja suatu organisasi dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun berkenaan. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja BKPSDM Kabupaten
Lamandau Tahun 2023

NO	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Mewujudkan sumber daya aparatur yang kompeten dan profesional dalam peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik	Indeks Profesionalitas ASN	61	63,09	103,43%
2	Meningkatkan kualitas SDM ASN	Persentase ASN yang mengikuti Diklat dan Lulus dengan Predikat memuaskan	80%	90%	112,50%
3	Meningkatkan kualitas administrasi kepegawaian	Persentase aparatur yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrator yang sesuai standar kompetensi jabatan	82,25%	98,94%	120,29%
		Persentase tingkat layanan administrasi kepegawaian	82%	89,92%	109,66%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel diatas menunjukkan bahwa :

1. Indikator tujuan pada BKPSDM Kabupaten Lamandau yaitu mengukur “Indeks Profesionalitas ASN”.

1. Skema pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah sebagai berikut :

NO.	DIMENSI (INDIKATOR)	SUB DIMENSI	BOBOT DIMENSI	BOBOT SUB DIMENSI	JAWABAN (RATING)	BOBOT SKOR
I	KUALIFIKASI	Data/Informasi Riwayat Jenjang Pendidikan Formal	25%			
		1 S-3		25		25
		2 S-2		20		
		3 S-1/D-IV		15		
		4 D-III		10		
		5 SLTA/D-II/D-I/ sederajat		5		
		6 Di bawah SLTA		1		
						25
II	KOMPETENSI	Data/Informasi Riwayat Pengembangan Kompetensi	40%			
		1 Diklatpim (bagi Struktural)				
		a. Sudah Ikut Diklatpim		15		15
		b. Belum Ikut Diklatpim		0		
		2 Diklat Fungsional (bagi JF)				
		a. Sudah Ikut Diklat Fungsional				
		b. Belum Ikut Diklat Fungsional				
		3 Diklat Teknis 20 JP				
		a. Sudah Ikut Diklat Teknis 20 JP		15		15
		b. Belum Ikut Diklat Teknis 20 JP		0		
		4 Seminar/Workshop/sejenis				
		a. Sudah Ikut Seminar/Workshop/sejenis		10		10
		b. Belum Ikut Seminar/Workshop/sejenis		0		
						40

NO.	DIMENSI (INDIKATOR)	SUB DIMENSI	BOBOT DIMENSI	BOBOT SUB DIMENSI	JAWABAN (RATING)	BOBOT SKOR
III	KINERJA	Data/Informasi Hasil Penilaian Kinerja	30%			
		a. Sangat Baik (91 - 100)		30		30
		b. Baik (76 - 90)		25		
		c. Cukup (61 - 75)		15		
		d. Kurang (51 - 60)		5		
		e. Buruk (50 ke bawah)		1		
						30
IV	DISIPLIN	Data/Informasi Riwayat Hukuman Disiplin	5%			
		1 Pernah Dikenai Hukuman Disiplin		5		5
		2 Pernah Dikenai Hukuman Disiplin				
		a. Ringan		3		
		b. Sedang		2		
		c. Berat		1		
						5
		TOTAL BOBOT	100%		NILAI IP	100

2. Kategori Tingkat Profesionalitas ASN adalah sebagai berikut :

NILAI	TINGKAT PROFESIONALISME
91 – 100	Sangat Tinggi
81 – 90	Tinggi
71 – 80	Cukup / Sedang
61 – 70	Rendah
≤ 60	Sangat Rendah

3. Rumus Pengukuran Indeks adalah sebagai berikut :

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme Dimensi ke-i

IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin"

Sebagai informasi pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dimulai dari pengukuran Indeks Profesionalitas ASN per individu yang selanjutnya digabung menjadi per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan selanjutnya dikompilasi menjadi Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Lamandau.

Metode pengisian Indeks Profesionalitas ASN yaitu BKD/BKPP/BKPSDM/Biro Kepegawaian Instansi melakukan pemutakhiran data SIASN untuk keperluan pengisian Indeks Profesionalitas ASN. Setelah melakukan pemutakhiran data di SIASN, selanjutnya akan dilakukan sinkronisasi data untuk pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Aplikasi DJASN Indeks Profesionalitas ASN. Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN dilakukan secara otomatis oleh sistem. Hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat dilihat oleh PNS dan BKD/BKPP/BKPSDM/Biro Kepegawaian Instansi di aplikasi MyASN BKN dan Aplikasi DJASN Indeks Profesionalitas ASN.

Adapun data dari pengukuran tersebut yang dirilis oleh Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara (BKN) per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Penghitungan Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023

Instansi	Kategori	Jumlah PNS	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	NILAI IP ASN
Pemerintah Kabupaten Lamandau	Rendah	2.680	20.99	13.71	23.39	4.99	63.09

Berdasarkan tabel di atas, maka hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Lamandau adalah 63,09 berada dalam kategori Rendah (61 - 70). Sedangkan dari target indikator tujuan perangkat daerah sebesar 61 dapat terealisasi sebesar 63,09 atau dengan tingkat capaian 103,43% (sangat berhasil).

2. Indikator Sasaran Strategis 1 : Persentase ASN yang mengikuti Diklat dan Lulus dengan Predikat memuaskan. Pada Tahun 2023 dari target 80% tersebut dapat terealisasi sebesar 90% atau dengan tingkat capaian sebesar 112,50% (sangat berhasil). ASN yang mengikuti Diklat dan Lulus dengan Predikat memuaskan dan sangat memuaskan pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 30 orang, terealisasi sebanyak 27 orang dari 30 orang peserta yang mengikuti diklat atau dengan capaian 90%. Rincian kegiatan diklat pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Kegiatan	Target /Usul	Realisasi/ PNS Lulus Diklat
PNS Diklat Dasar	1	1
PNS Diklat PIM 4	10	8
PNS Diklat PIM 3	19	18
Total	30	27

3. Indikator Sasaran Strategis 2 : Persentase Aparatur yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrator yang sesuai standar kompetensi jabatan. Pada tahun 2023 dari target 82,25% tersebut dapat terealisasi sebesar 98,94% atau dengan tingkat capaian 120,29% (sangat berhasil), dengan rincian kebutuhan dan keadaan Aparatur yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrator per 31 Desember 2023 adalah berikut :

No	Jabatan	Kebutuhan	Keadaan
1	JPT Pratama	33	31
2	Administrator	155	155
Total		188	186

4. Indikator Sasaran Strategis 3 : Persentase tingkat layanan administrasi kepegawaian, dari target sebesar 82% dapat terealisasi sebesar 89,92% atau dengan tingkat capaian 109,66% (sangat berhasil). Tercapainya indikator dipengaruhi oleh target dari kegiatan pelayanan kepada ASN dalam pengurusan administrasi kepegawaian yaitu sebagai berikut :

No	Jenis Layanan	Berkas Usulan	Berkas yang selesai diterbitkan	Capaian
1	Keputusan Pengangkatan Sebagai CPNS/PPPK	115	55	89,92%
2	Mutasi Pegawai	121	121	
3	Pensiun	48	45	
4	Perbaikan Data Pegawai	2	1	
5	Update data Pegawai	6.184	5.422	
6	Karis	16	14	
7	Karsu	9	3	
8	Karpeg	93	13	
9	Taspen	-	-	
10	Rekomendasi Tenaga Kontrak	1.745	1.745	
11	Surat Keterangan Dokumen dalam Proses	2	2	
12	Kenaikan Pangkat	595	591	
13	Keputusan Pengangkatan dalam JPT Pratama, Administrator dan Pengawas	100	100	
14	Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional	80	80	
15	Perbaikan Dokumen	-	-	
TOTAL		9.110	8.192	

Berdasarkan tabel dan penjelasan hasil evaluasi terhadap tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat disimpulkan bahwa Tingkat capaian indikator kinerja utama BKPSDM Kabupaten Lamandau tahun 2023 sebesar 111,47% (sangat berhasil) dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian sasaran strategis, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{103,43\% + 112,50\% + 120,29\% + 109,66\%}{4} = 111,47\% \quad (\text{sangat berhasil})$$

3.1.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Pengukuran Kinerja dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir bertujuan untuk melihat dan menilai, apakah terdapat kemajuan atau kemunduran dalam pencapaian hasil program dan kegiatan prioritas. Berdasarkan tabel 3.3, pada tahun 2023 seluruh indikator kinerja capaian dapat melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Mewujudkan sumber daya aparatur yang kompeten dan profesional dalam peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik	Indeks Profesionalitas ASN	55	57,62	104,76%	58	57,91	99,84%	61	63,09	103,43%
2	Meningkatkan kualitas SDM ASN	Persentase ASN yang mengikuti Diklat dan Lulus dengan Predikat memuaskan	76%	100%	131,58%	78%	100%	128,21%	80%	90%	112,50%

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
3	Meningkatkan kualitas adminitrasi kepegawaian	Persentase aparatur yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrator yang sesuai standar kompetensi jabatan	39,24%	90,48%	230,58%	60,75%	86,88%	143,01%	82,25%	98,94%	120,29%
		Persentase tingkat layanan administrasi kepegawaian	77%	96,17%	124,90%	80%	99%	123,75%	82%	89,92%	109,66%

3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Rencana Kerja Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023. Perbandingan antara Capaian Kinerja dengan target Jangka Menengah dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan Dengan Target Jangka Menengah

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target Renstra Tahun 2018 - 2023	Capaian Kinerja (%)
1.	Mewujudkan sumber daya aparatur yang kompeten dan profesional dalam peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik		Indeks Profesionalitas ASN	63,09	61	103,43%
		Meningkatkan kualitas SDM ASN	Persentase ASN yang mengikuti Diklat dan Lulus dengan Predikat memuaskan	90%	80%	112,50%
		Meningkatkan kualitas administrasi kepegawaian	Persentase Aparatur yang menduduki Jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrator yang sesuai standar kompetensi jabatan	98,94%	82,25%	120,29%
			Persentase tingkat layanan administrasi kepegawaian	89,92%	82%	109,66%

Berdasarkan tabel di atas jika dibandingkan dengan target akhir tahun Perubahan Renstra 2018-2023 telah memenuhi target, namun pencapaian tersebut masih sangat memerlukan upaya yang konsisten dan dukungan dari semua pihak yang terkait untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja sehingga peran dan tanggung jawab dalam membentuk sumber daya aparatur sebagai pelayan masyarakat serta peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dibidang manajemen kepegawaian dapat terwujud.

1. Indikator Tujuan Perangkat Daerah “Indeks Profesionalitas ASN” terus memerlukan upaya dan pemahaman pentingnya peningkatan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin dari setiap aparatur.
2. Indikator Sasaran 1 Perangkat Daerah “Persentase ASN yang mengikuti Diklat dan Lulus dengan predikat memuaskan”. Merupakan proses untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan seorang pegawai demi tercapainya tujuan suatu organisasi. Melalui diklat diharapkan setiap unsur organisasi dapat menyamakan visi dan dinamika pola berpikir untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.
3. Indikator Sasaran 2 Perangkat Daerah “Persentase aparatur yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrator yang sesuai standar kompetensi jabatan”. Standar Kompetensi Jabatan adalah deskripsi pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan. Oleh karenanya penyusunan Standar kompetensi jabatan untuk setiap jenjang jabatan sangat diperlukan.
4. Indikator Sasaran 3 Perangkat Daerah “Persentase tingkat layanan administrasi kepegawaian” Pelayanan administrasi kepegawaian yang orientasi pada hasil dan berdampak masih perlu terus diupayakan. Sehingga diharapkan melalui meningkatnya tingkat layanan administrasi kepegawaian memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepuasan aparatur dan dalam mewujudkan profesionalitas aparatur sipil negara di Kabupaten Lamandau.

3.1.4. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang akan dilakukan

1. Analisis Penyebab Keberhasilan

Beberapa penyebab keberhasilan BKPSDM Kabupaten Lamandau dalam pencapaian target indikator sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

a. Indeks Profesionalitas ASN

- Menjalin koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak yang berkontribusi dalam pencapaian peningkatan Indeks Profesionalitas ASN;
- Melaksanakan Pendidikan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kompetensi ASN yang telah menduduki jabatan;
- Penyampaian Informasi terkait pengembangan kompetensi kepada SKPD untuk mengikuti Diklat yang sesuai dengan kebutuhan;
- Implementasi UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017 bahwa ASN berkesempatan mengembangkan kompetensinya melalui diklat minimal 20 JP;
- Seleksi ASN berdasarkan penetapan formasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau melalui tahapan seleksi Administrasi, seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang;
- Melakukan pengelolaan pendidikan lanjutan ASN dengan mempertimbangkan rasio kebutuhan dan kemampuan organisasi;
- Adanya perkembangan metode pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS, dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- Kesadaran aparatur tentang kinerja yang berdampak;
- Kesadaran aparatur tentang disiplin;
- Adanya pemahaman yang baik tentang tugas pokok dan fungsi setiap aparatur;
- Terjalin suasana kerja yang kondusif antar aparatur di lingkungan BKPSDM Kabupaten Lamandau.

- b. Persentase ASN yang mengikuti Diklat dan Lulus dengan Predikat memuaskan
 - Adanya kerjasama dengan pola kemitraan dengan Lembaga Diklat di Provinsi ataupun di daerah lain;
 - Ketersediaan anggaran yang mendukung;
 - Berkembangnya metode pelaksanaan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional PNS oleh penyelenggara diklat yang tidak hanya menggunakan metode klasikal/tatap muka, melainkan juga memanfaatkan teknologi informasi yakni dengan metode *blended learning* dan atau *e-learning*, sehingga PNS dapat melaksanakan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional dimana dan atau kapan saja tanpa perlu harus atau sering meninggalkan unit kerja bertugas.
- c. Persentase aparatur yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrator yang sesuai standar kompetensi jabatan
 - Pelaksanaan uji kompetensi untuk aparatur yang akan menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrator;
 - Pelaksanaan Evaluasi Jabatan.
- d. Persentase tingkat layanan administrasi kepegawaian
 - Penyampaian informasi dilakukan dengan jelas;
 - Peran aktif Pengelola Kepegawaian pada setiap Perangkat Daerah;
 - Pelayanan konsultasi pengelolaan kepegawaian dilakukan secara optimal baik dengan kunjungan langsung ataupun konsultasi yang dilakukan dengan media elektronik.

2. Analisis Permasalahan

Beberapa kendala atau permasalahan pada pelaksanaan pencapaian kinerja tujuan, sasaran dan program/kegiatan dalam pencapaian target indikator sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

a. Indeks Profesionalitas ASN

Beberapa faktor yang mempengaruhi masih sangat rendahnya Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut :

- Keterbatasan informasi tentang penyelenggaraan Diklat 20 JP;

- Minat untuk mengembangkan diri dari ASN sangat rendah;
- Pemahaman ASN tentang pentingnya peningkatan kualifikasi dan kompetensi masih rendah;
- Kurangnya pengetahuan ASN terkait cara peningkatan kompetensi;
- Minimnya anggaran untuk penyelenggaraan Diklat Teknis;
- Faktor usia yang melatarbelakangi ASN tidak ingin meningkatkan kualifikasinya;
- Alokasi Anggaran Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN belum satu pintu sehingga kesulitan dalam pengumpulan data terkait keikutsertaan PNS dalam peningkatan kompetensi.

b. Persentase ASN yang mengikuti Diklat dan Lulus dengan Predikat memuaskan

Adapun beberapa kendala yang dihadapi pada tahun 2023 sehingga mempengaruhi capaian indikator ini tidak optimal adalah sebagai berikut :

- Kondisi kesehatan peserta diklat yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan kegiatan diklat hingga akhir;
- Perubahan jabatan peserta diklat selama diklat berlangsung sehingga diklat yang diikuti tidak lagi relevan.

c. Persentase aparatur yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrator yang sesuai standar kompetensi jabatan

- Hasil uji kompetensi dan evaluasi Jabatan yang belum sepenuhnya direalisasikan melalui mutasi jabatan/pelantikan, sehingga rencana seleksi terbuka pengisian JPT Pratama belum dapat dilaksanakan.

d. Persentase tingkat layanan administrasi kepegawaian

Beberapa permasalahan dalam pencapaian target indikator sasaran perangkat daerah ini adalah sebagai berikut:

- Pengajuan dokumen administrasi kepegawaian yang belum sepenuhnya memenuhi norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan;
- Kesadaran Aparatur tentang pentingnya dokumen administrasi kepegawaian masih rendah;
- Perubahan regulasi yang terjadi secara terus menerus;
- Migrasi dari pelayanan kepegawaian secara konvensional ke elektronik yang menyulitkan pengelola kepegawaian untuk beradaptasi;
- Belum terdapat sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan sistem yang dimiliki oleh pusat (SIASN BKN).

3. Alternatif solusi

Setelah melakukan analisis terhadap penyebab keberhasilan dan permasalahan pada pelaksanaan pencapaian kinerja tujuan, sasaran dan program/kegiatan, maka dapat ditentukan beberapa alternatif solusi untuk permasalahan atau kendala yang ada sehingga kedepannya dapat dilakukan perbaikan, yaitu :

a. Indeks Profesionalitas ASN

- Pendataan Kebutuhan Diklat melalui perangkat daerah yang ada di Kabupaten Lamandau;
- Pemerintah Daerah menyediakan anggaran yang lebih untuk peningkatan kualifikasi aparatur melalui tugas belajar;
- Pemerintah Daerah menyediakan anggaran yang lebih untuk peningkatan kompetensi aparatur melalui diklat yang diselenggarakan sendiri ataupun mengikuti daerah lain sesuai dengan kebutuhan;
- Mendorong secara aktif kepada aparatur untuk mengikuti diklat-diklat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah/Pemerintah Pusat/Kementerian atau lembaga teknis lainnya dengan memberi informasi melalui surat ataupun media social;
- Perlunya penyusunan Standar Kompetensi Jabatan untuk seluruh jabatan;
- Pemusatan anggaran pengembangan, pendidikan dan pelatihan bagi PNS satu pintu di BKPSDM Kabupaten Lamandau.

- b. Persentase ASN yang mengikuti Diklat dan Lulus dengan Predikat memuaskan
 - Berkoordinasi dan bekerja sama dengan penyelenggara diklat terkait fasilitas kesehatan;
 - Pendataan kebutuhan diklat sebagai bahan Analisa Kebutuhan Diklat.
- c. Persentase aparatur yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrator yang sesuai standar kompetensi jabatan
 - Hasil uji kompetensi yang belum direalisasikan akan diakomodir di tahun selanjutnya melalui seleksi terbuka pengisian JPT Pratama.
- d. Persentase tingkat layanan administrasi kepegawaian
 - Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap jenis pelayanan administrasi kepegawaian.
 - Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam layanan administrasi kepegawaian;
 - Melaksanakan sosialisasi terkait peraturan – peraturan terbaru tentang administrasi kepegawaian;

3.1.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi Anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggaran akan semakin tinggi.

Perbandingan antara Capaian Kinerja dengan Serapan Anggaran Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.5
Tingkat Efisien Dan Efektivitas Kinerja
Tahun Anggaran 2023

No	Tujuan/Sasaran	Persentase Capaian Indikatpr Kinerja			Persentase Capaian Penyerapan Anggaran		
		Jumlah Capaian	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	Jumlah Capaian	Jumlah Program	Rata rata Capaian
1	Mewujudkan sumber daya aparatur yang kompeten dan profesional dalam peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik	103,43	1	103,43	194,35	2	97,17
		Tingkat Efisiensi		6,26			
		Tingkat Efektivitas		106,44			
2	Meningkatkan kualitas SDM ASN	112,50	1	112,50	97,67	1	97,67
		Tingkat Efisiensi		14,83			
		Tingkat Efektivitas		115,18			
3	Meningkatkan kualitas adminitrasi kepegawaian	229,95	2	114,97	195,27	2	97,63
		Tingkat Efisiensi		17,34			
		Tingkat Efektivitas		117,76			

Dari tabel di atas diketahui bahwa pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2023 menunjukkan realisasi kinerjanya lebih tinggi dibanding dengan realisasi anggarannya. Hal ini menunjukkan bahwa, pencapaian kinerja dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja utama telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang dianggarkan.

3.1.6. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Pada Tahun 2023 indikator kinerja utama telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Pencapaian target kinerja tersebut tidak terlepas dari program/kegiatan/sub kegiatan yang berperan dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 3.6
Penyerapan Anggaran Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pendukung Tercapainya Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PAGU (Rp)	PEYERAPAN ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Mewujudkan sumber daya aparatur yang kompeten dan profesional dalam peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik	Indeks Profesionalitas ASN	2.272.696.924	2.204.873.167	97,17
	Program Kepegawaian Daerah		1.505.357.924	1.455.448.806	96,68
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		229.710.108	225.924.907	98,35
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		115.379.384	113.118.980	98,04
	Pengelolaan Data Kepegawaian		114.330.724	112.805.927	98,67
	Mutasi dan Promosi ASN		661.362.092	653.509.051	98,81
	Pengelolaan Mutasi ASN		46.672.000	46.664.168	99,98
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		73.761.248	73.599.948	99,78
	Pengelolaan Promosi ASN		540.928.844	533.244.935	98,58
	Pengembangan Kompetensi ASN		499.994.000	464.083.086	92,82
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		499.994.000	464.083.086	92,82
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		114.291.724	111.931.762	97,94
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		54.665.600	53.685.638	98,21
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		59.626.124	58.246.124	97,69

No	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PAGU (Rp)	PEYERAPAN ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
	Program pengembangan sumber daya manusia		767.339.000	749.424.361	97,67
	Pengembangan Kompetensi Teknis		197.086.000	180.101.172	91,38
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		197.086.000	180.101.172	91,38
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		570.253.000	569.323.189	99,84
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan		570.253.000	569.323.189	99,84
2	Meningkatkan kualitas SDM ASN	Persentase ASN yang mengikuti Diklat dan Lulus dengan Predikat memuaskan	767.339.000	749.424.361	97,67
	Program pengembangan sumber daya manusia		767.339.000	749.424.361	97,67
	Pengembangan Kompetensi Teknis		197.086.000	180.101.172	91,38
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		197.086.000	180.101.172	91,38

No	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PAGU (Rp)	PEYERAPAN ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		570.253.000	569.323.189	99,84
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama,serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan		570.253.000	569.323.189	99,84
3	Meningkatkan kualitas adminitrasi kepegawaian		5.903.879.581	5.792.050.585	97,63
		Persentase aparatur yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrator yang sesuai standar kompetensi jabatan	661.362.092	653.509.051	98,81
	Program Kepegawaian Daerah		661.362.092	653.509.051	98,81
	Mutasi dan Promosi ASN		661.362.092	653.509.051	98,81
	Pengelolaan Mutasi ASN		46.672.000	46.664.168	99,98
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		73.761.248	73.599.948	99,78
	Pengelolaan Promosi ASN		540.928.844	533.244.935	98,58
		Persentase tingkat layanan administrasi kepegawaian	5.242.517.489	5.138.541.534	98,02
	Program Kepegawaian Daerah		843.995.832	801.939.755	95,02
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		229.710.108	225.924.907	98,35
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		115.379.384	113.118.980	98,04
	Pengelolaan Data Kepegawaian		114.330.724	112.805.927	98,67
	Pengembangan Kompetensi ASN		499.994.000	464.083.086	92,82

No	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PAGU (Rp)	PEYERAPAN ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		499.994.000	464.083.086	92,82
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		114.291.724	111.931.762	97,94
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		54.665.600	53.685.638	98,21
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		59.626.124	58.246.124	97,69
	Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		4.398.521.657	4.336.601.779	98,59%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.930.450.034	2.887.915.145	98,55%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.930.450.034	2.887.915.145	98,55%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		180.913.820	173.834.084	98,63%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		80.362.000	78.939.000	98,63%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		100.551.820	94.895.084	94,37
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		402.061.948	398.137.441	99,02
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		25.714.576	25.713.000	99,99
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		114.096.128	112.604.032	98,69
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		26.535.000	26.157.000	98,58
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		27.774.244	27.764.250	99,96
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		12.366.000	12.366.000	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		195.576.000	193.533.159	98,96
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		199.304.000	198.112.700	99,40
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		108.310.000	108.235.000	99,93
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		90.994.000	89.877.700	98,77

No	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PAGU (Rp)	PEYERAPAN ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		409.728.115	405.494.209	98,97
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		6.250.000	5.278.000	84,45
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		187.355.328	184.119.687	98,27
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		216.122.787	216.096.522	99,99
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		276.063.740	273.108.200	98,93
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		88.980.000	86.355.200	97,05
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		3.000.000	2.977.000	99,23
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		115.379.100	115.256.000	99,89
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		68.704.640	68.520.000	99,73

Program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang mendukung tercapainya indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Terealisasi 100 Persen dari target keluaran 100 persen dengan indikator Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah. Pagu anggaran untuk program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota sebesar Rp4.398.521.657 terserap 98,59% yaitu sebesar Rp4.336.601.779, dengan rincian sebagai berikut :

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Terlaksananya 14 bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau dengan pagu Rp2.930.450.034 terserap 98,55% yaitu sebesar Rp2.887.915.145, dengan rincian sebagai berikut :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN adalah 26 orang/bulan dari target 30 orang/bulan.

b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Persentase penunjang peningkatan disiplin dan kapasitas aparatur yang tersedia pada tahun 2023 adalah 100 persen dari target 100 persen, dengan pagu Rp 180.913.820 terserap 96,09% yaitu sebesar Rp 173.834.084, dengan rincian sebagai berikut :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Pada tahun 2023 terlaksana pengadaan 3 Paket Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yaitu baju PDH, Hitam Putih dan Batik Kalteng.
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Pada tahun 2023 terlaksana Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan untuk 40 Orang ASN BKPSDM Kabupaten Lamandau dari target 40 orang, Sosialisasi dilakukan sebanyak dua kali dengan rincian sebagai berikut :
 - Sosialisasi dan pelatihan optimalisasi fungsi sistem informasi kepegawaian menggunakan aplikasi E- Kinerja, SIASN dan DISPAKATI Pada Tanggal 10 – 12 Oktober 2023 di Aula Junjung Buih, Kantor Regional VIII BKN Banjar Baru

- Sosialisasi dan Pelatihan Optimalisasi Fungsi Sistem Informasi Kepegawaian Menggunakan Aplikasi E-Kinerja, SIASN dan DISPAKATI Pada Tanggal 04 – 05 Desember 2023 di Aula BKPSDM Kabupaten Lamandau.

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Persentase Kebutuhan pelayanan administrasi umum yang tersedia pada tahun 2023 adalah 100 persen dari target 100 persen, dengan pagu Rp 402.061.948 terserap 99,02% yaitu sebesar Rp 398.137.441, dengan rincian sebagai berikut :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya 1 Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada tahun 2023
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya 1 Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada tahun 2023
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Tersedianya 1 Paket Bahan Logistik Kantor pada tahun 2023
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Tersedianya 1 Paket Barang Cetak dan Penggandaan pada tahun 2023
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya 5 Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan pada tahun 2023 berupa langganan koran Kalteng Pos, Radar Sampit, Suara Kalteng, Tabengan dan Palangka Pos
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Tersedianya 123 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun 2023

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang operasional perkantoran adalah 100 persen dari target 100 persen, dengan pagu Rp 199.304.000 terserap 99,40% yaitu sebesar Rp 198.112.700, dengan rincian sebagai berikut :

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pada tahun 2023 telaksana 3 Unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya berupa :

- Pengadaan Meubeler Kantor berupa 15 buah kursi kerja, 6 buah meja bulat dan 10 buah meja rapat
- Pengadaan mesin potong rumput sebanyak 2 unit
- Pengadaan sound system sebanyak 1 paket.

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pada tahun 2023 telaksana 3 Unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya berupa :

- Belanja sarana dan prasarana gedung kantor berupa 30 set sarung kursi, 12 set taplak meja bulat, 10 set taplak meja panjang.
- Belanja modal mebel berupa 3 set meja dapur dan 5 unit sofa
- Belanja modal alat rumah tangga lainnya berupa 2 roll karpet lantai tebal dan 2 buah trolley barang.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase penunjang operasional perkantoran yang tersedia adalah 100 persen dari target 100 persen, dengan pagu Rp 409.728.115 terserap 98,97% yaitu sebesar Rp405.494.209, dengan rincian sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada tahun 2023 adalah 2 laporan dari target 2 laporan berupa laporan surat masuk dan laporan surat keluar.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun 2023 adalah 12 Laporan dari target 12 Laporan.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun 2023 adalah 12 laporan dari target 12 laporan.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang tersedia adalah 100 persen dari target 100 persen, dengan pagu Rp 276.063.740 terserap 98,93% yaitu sebesar Rp273.108.200, dengan rincian sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya adalah 20 Unit dari target 20 unit, berupa 18 unit motor dan 2 unit mobil.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 4 unit dari target 4 unit berupa terpeliharanya 2 lemari dan 2 meja.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit dari target 1 unit gedung kantor.

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 80 unit dari target 80 unit berupa 2 unit mesin potong rumput, 25 unit AC, 35 Unit Komputer, 15 Unit Printer, 1 Unit genset, dan 2 Paket laundry.

2. Program Kepegawaian Daerah

Terealisasi 100 Persen dari target keluaran 77 persen dengan indikator Persentase dokumen kepegawaian yang dikeluarkan tepat waktu . Pagu anggaran Program Kepegawaian Daerah sebesar Rp1.505.357.924 terserap 96,68% yaitu sebesar Rp1.455.448.806, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN.

Jumlah Penetapan dan Update Dokumen Kepegawaian adalah 1 dokumen dari target 1 dokumen, dengan pagu Rp229.710.108 terserap 98,35% yaitu sebesar Rp225.924.907, dengan rincian sebagai berikut :

- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN.
Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN pada tahun 2023 adalah 55 dokumen dari target 25 dokumen, berupa 46 Surat Perjanjian Kerja PPPK Guru Formasi 2022 dan 9 Surat Perjanjian Kerja PPPK Tenaga Kesehatan Formasi 2022.
- Pengelolaan Data Kepegawaian.
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian pada tahun 2023 adalah 5.422 Dokumen berdasarkan jumlah peremajaan data yang dilakukan melalui aplikasi SIASN dari target 2.929 dokumen.

b. Mutasi dan Promosi ASN

Jumlah Penetapan Keputusan Dokumen Administrasi Kepegawaian adalah 1 dokumen dari target 1 dokumen, dengan pagu Rp 661.362.092 terserap 98,81% yaitu sebesar Rp 653.509.051, dengan rincian sebagai berikut :

- Pengelolaan Mutasi ASN.

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Mutasi ASN pada tahun 2023 adalah 121 dokumen dari target 50 dokumen.

- Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN.

Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN adalah 591 dokumen dari target 300 dokumen berupa penetapan keputusan kenaikan pangkat PNS sebanyak 418 keputusan pada periode April 2023 dan 173 keputusan pada periode Oktober 2023

- Pengelolaan Promosi ASN.

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN adalah 100 dokumen dari target 7 dokumen. Tahun 2023 Penempatan pejabat struktural dilaksanakan melalui pelantikan yang diselenggarakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut :

- Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada tanggal 10 Agustus 2023 di Aula Inspektorat Kabupaten Lamandau, sebanyak 6 Orang dengan rincian sebagai berikut :

Eselon II.b : 6 Orang

- Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas pada tanggal 21 September 2023 di GPU Lantang Torang,

sebanyak 94 Orang dengan rincian sebagai berikut :

Eselon II.b : 2 Orang

Eselon III.a : 22 Orang

Eselon III.b : 35 Orang

Eselon IV.a : 30 Orang

Eselon IV.b : 5 Orang

c. Pengembangan Kompetensi ASN

Persentase pemberian bantuan pendidikan bagi PNS Tugas Belajar yang terpenuhi adalah 100 persen dari target 100 persen, dengan pagu Rp 499.994.000 terserap 92,82 % yaitu sebesar Rp 464.083.086, dengan rincian sebagai berikut :

- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN.

Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan adalah 21 orang dari target 21 orang, dengan rincian sebagai berikut :

- Bantuan S.1 dan Pendidikan Profesi sebanyak 15 Orang
- Bantuan S.2 sebanyak 3 Orang
- Bantuan PPDS sebanyak 3 Orang

d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja dan pelanggaran disiplin adalah 2 dokumen dari target 2 dokumen , dengan pagu Rp 114.291.724 terserap 97,94 % yaitu sebesar Rp 111.931.762, dengan rincian sebagai berikut :

- Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur adalah 2.874 dokumen dari target 2.100 dokumen.
- Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN.

Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN adalah 3 laporan dari target 5 laporan.

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Terealisasi 95 Persen dari target keluaran 79 persen dengan indikator Persentase PNS yang memiliki kesesuaian dengan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional. Pagu anggaran Program Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp767.339.000 terserap 97,67% yaitu sebesar Rp749.424.361, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengembangan Kompetensi Teknis

Persentase kebutuhan pengembangan kompetensi teknis bagi ASN yang terpenuhi adalah 100 persen dari target 100 persen dengan pagu Rp 197.086.000 terserap 91,38 % yaitu sebesar Rp 180.101.172, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.

Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama adalah 13 dokumen dari target 4 dokumen, dengan rincian sebagai berikut :

- 2 dokumen sertifikat pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Legal Drafting Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah a.n Paternus dan Abdi Dharma Saputra yang diikuti

pada tanggal 13 – 17 Februari 2023 di BPSDM Kemendagri di Jakarta

- 8 dokumen sertifikat pelatihan sertifikasi kompetensi pengadaan barang jasa pemerintahan level 1 a.n Kamini Anthus, Wikan Susila Pakerti, Lisa, Paternus, Agus Sutrisno, Tirariadi, Nurmila dan Norhalimah Tustaiyah yang di selenggarakan oleh Icon Training Center di Palangka Raya pada tanggal 5 – 7 Juli 2023.
- 3 dokumen sertifikat Pelatihan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah an. Nurmila, Norhalimah Tustaiyah dan Wirawati yang diselenggarakan di MEP FEB UGM Yogyakarta pada tanggal 15-17 November 2023 .

b. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

Persentase PNS yang lulus mengikuti diklat pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional adalah 90 persen dari target 100 persen dengan pagu Rp 570.253.000 terserap 99,84% yaitu sebesar Rp 569.323.189, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan.

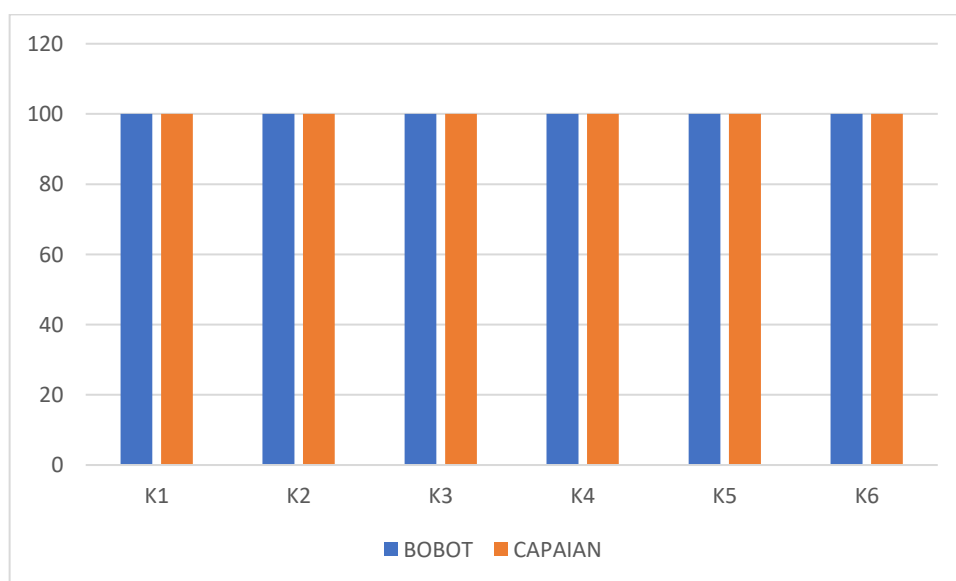
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber

Belajar, dan Kerja Sama adalah 27 dokumen dari target 30 dokumen, dengan rincian sebagai berikut :

- 18 Dokumen sertifikat Pelatihan Kepemimpinan Administrator.
- 8 Dokumen sertifikat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.
- 1 Dokumen sertifikat Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS).

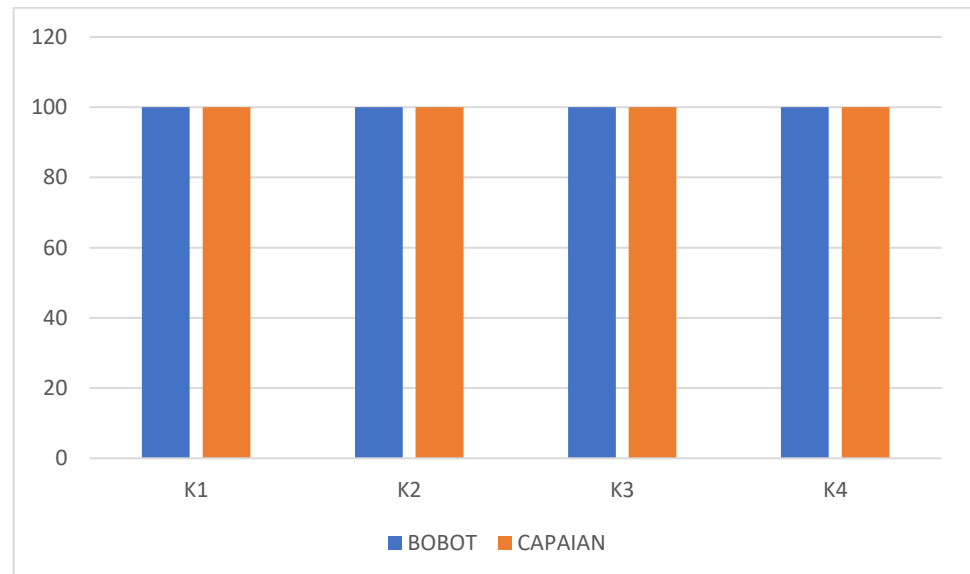
Untuk melihat capaian kinerja program/kegiatan dapat dilihat pada diagram sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



- K1 = Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- K2 = Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- K3 = Administrasi Umum Perangkat Daerah
- K4 = Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- K5 = Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- K6 = Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Kepegawaian Daerah



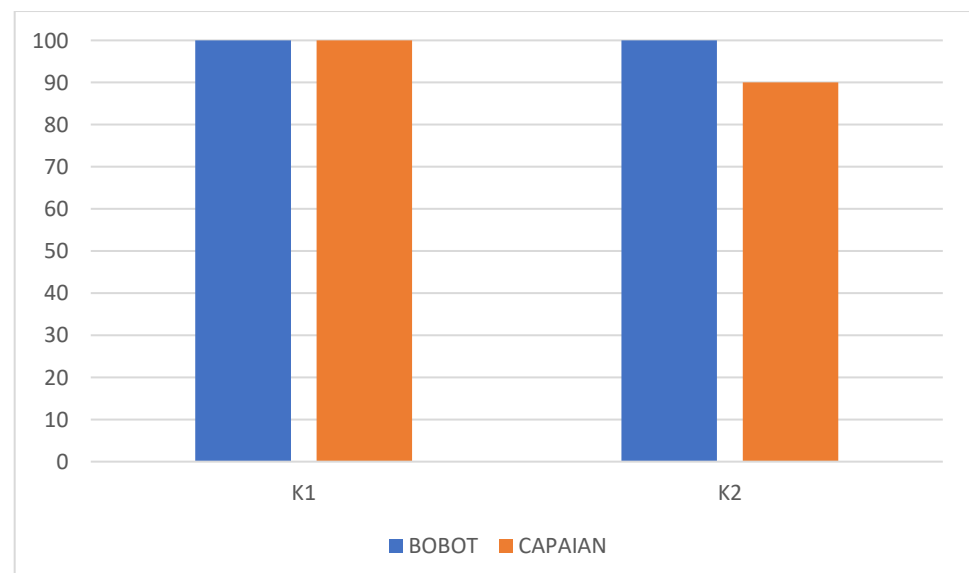
K1 = Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

K2 = Mutasi dan Promosi ASN

K3 = Pengembangan Kompetensi ASN

K4 = Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia



K1 = Pengembangan Kompetensi Teknis

K2 = Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

3.2. REALISASI ANGGARAN

3.2.1. Pagu Anggaran

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran (TA) 2023, menerima anggaran belanja sebesar Rp6.671.218.581,- (**Enam milyar enam ratus tujuh puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah**) yang digunakan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan di BKPSDM Kabupaten Lamandau.

3.2.2. Penyerapan Anggaran

Penyerapan DPPA BKPSDM Tahun 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp 6.541.474.946,- (**Enam milyar lima ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah**) atau 98,06 % dari total pagu anggaran.

No	DPA	Pagu	Realisasi	%
1.	BKPSDM	Rp. 6.671.218.581,-	Rp 6.541.474.946,-	98,06

Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2022 dibiayai dari DPPA BKPSDM, dengan kelompok sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	2.938.610.034	2.896.075.145	98,55%
2	Belanja Barang & Jasa	3.576.399.547	3.490.187.101	97,59%
3	Belanja Modal	156.209.000	155.212.700	99,36%

TABEL 3.7
Penyerapan Anggaran Tahun 2023

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN	PENYERAPAN ANGGARAN	CAPAIAN (%)	EFISIENSI/ ELIMINASI
				Rp	%	
1	2		3	4	5	6
1	Program	: Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.398.521.657	4.336.601.779	98,59	61.919.878
	Kegiatan	: Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.930.450.034	2.887.915.145	98,55	42.534.889
	Sub Kegiatan	: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.930.450.034	2.887.915.145	98,55	42.534.889
	Kegiatan	: Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	180.913.820	173.834.084	96,09	7.079.736
	Sub Kegiatan	: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	80.362.000	78.939.000	98,23	1.423.000
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100.551.820	94.895.084	94,37	5.656.736
	Kegiatan	: Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	402.061.948	398.137.441	99,02	3.924.507
	Sub Kegiatan	: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.714.576	25.713.000	99,99	1.576
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	114.096.128	112.604.032	98,69	1.492.096
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.535.000	26.157.000	98,58	378.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.774.244	27.764.250	99,96	9.994
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.366.000	12.366.000	100	0
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195.576.000	193.533.159	98,96	2.042.841
	Kegiatan	: Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	442.338.212	422.162.548	95,44%	20.175.664
	Sub Kegiatan	: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	108.310.000	108.235.000	99,93	75.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90.994.000	89.877.700	98,77	1.116.300
	Kegiatan	: Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	409.728.115	405.494.209	98,97	4.233.906
	Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.250.000	5.278.000	84,45	972.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	187.355.328	184.119.687	98,27	3.235.641
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	216.122.787	216.096.522	99,99	26.265

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN	PENYERAPAN ANGGARAN	CAPAIAN (%)	EFISIENSI/ ELIMINASI
				Rp	%	
	Kegiatan :	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	276.063.740	273.108.200	98,93	2.955.540
	Sub Kegiatan :	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88.980.000	86.355.200	97,05	2.624.800
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	2.977.000	99,23	23.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	115.379.100	115.256.000	99,89	123.100
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	68.704.640	68.520.000	99,73	184.640
2	Program :	Program Kepegawaian Daerah	1.505.357.924	1.455.448.806	96,68	49.909.118
	Kegiatan :	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	229.710.108	225.924.907	98,35	3.785.201
	Sub Kegiatan :	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	115.379.384	113.118.980	98,04	2.260.404
		Pengelolaan Data Kepegawaian	114.330.724	112.805.927	98,67	1.524.797
	Kegiatan :	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	661.362.092	653.509.051	98,81	7.853.041
	Sub Kegiatan :	Pengelolaan Mutasi ASN	46.672.000	46.664.168	99,98	7.832
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	73.761.248	73.599.948	99,78	161.300
		Pengelolaan Promosi ASN	540.928.844	533.244.935	98,58	7.683.909
	Kegiatan :	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	499.994.000	464.083.086	92,82	35.910.914
	Sub Kegiatan :	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	499.994.000	464.083.086	92,82	35.910.914
	Kegiatan :	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	114.291.724	111.931.762	97,94	2.359.962
	Sub Kegiatan :	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	54.665.600	53.685.638	98,21	979.962
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	59.626.124	58.246.124	97,69	1.380.000
3	Program :	Program pengembangan sumber daya manusia	767.339.000	749.424.361	97,67	17.914.639
	Kegiatan :	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	197.086.000	180.101.172	91,38	16.984.828
	Sub Kegiatan :	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	197.086.000	180.101.172	91,38	16.984.828

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PENYERAPAN ANGGARAN	CAPAIAN (%)	EFISIENSI/ ELIMINASI
			Rp	%	
	Kegiatan : Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	570.253.000	569.323.189	99,84	929.811
	Sub Kegiatan : Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	570.253.000	569.323.189	99,84	929.811
TOTAL		6.671.218.581	6.541.474.946	98,06	129.743.635

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau Tahun 2018–2023, Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada pemberi delegasi wewenang. Seperti halnya pada Instansi lain penerapan sistem yang baru sangat diperlukan persiapan sumber daya untuk mengantisipasi perubahan tersebut, oleh sebab itu Laporan Kinerja ini lebih banyak dipandang sebagai proses pembelajaran dibandingkan sebagai bentuk pemenuhan penilaian tampilan organisasi. Akan sangat wajar apabila Laporan Kinerja ini masih belum sempurna, karena itu sikap adaptif dan responsif diberikan terhadap segala bentuk kritik dan saran perbaikannya.

4.2 SARAN

Obyektivitas informasi dari penerapan indikator kinerja dan penyajian angka-angka untuk pencapaian kinerja Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau Tahun 2018–2023 dilatarbelakangi komitmen dan dibangun dari seluruh potensi yang ada serta antisipasi yang perlu diperhatikan dalam mempertahankan atau meningkatkan kualitas kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dimasa mendatang adalah melaksanakan rencana strategis yang memadukan *system bottom up planning* dan *top down planning* untuk disepakati dan dilaksanakan bersama secara konsisten dan bertanggung jawab.

Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian secara terus menerus dan berkesinambungan, diantaranya :

1. Mengikutsertakan staf dalam pendidikan dan pelatihan baik teknis/fungsional maupun kepemimpinan dengan maksud untuk menambah pengetahuan, kemampuan dan wawasan pegawai dalam meningkatkan pelayanan serta terbinanya tertib administrasi yang tepat orang, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat kuantitas.
2. Meningkatkan fungsi koordinasi dan komunikasi baik internal maupun eksternal serta pembinaan kelembagaan/organisasi.
3. Mengaktifkan fungsi unit pengolahan data sebagai pusat data dan informasi kepegawaian yang diharapkan secara internal dapat memberikan kontribusi dalam manajemen sumber daya manusia dan

secara eksternal dapat diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Sebagai realisasi prinsip perencanaan dan pelayanan, tiada berlebihan kiranya apabila asumsi yang relevan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak, yaitu tersedianya sarana dan prasarana yang dapat menunjang semua kegiatan kinerja serta didukung dengan pembiayaan yang memadai.

4. Laporan ini agar dipahami oleh seluruh aparatur di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau dan perlu dikomunikasikan secara terus menerus sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.
5. Laporan ini menjadi bahan pemeriksaan agar BKPSDM semakin meningkatkan kinerjanya. Terutama dalam meningkatkan kinerja anggaran agar lebih dioptimalkan sesuai dengan tujuan BKPSDM dan optimalisasi pada efisiensi belanja yang wajar dari tahun ke tahun. Sehingga dengan kinerja yang baik maka efektivitas, produktivitas dan efisiensi belanja juga semakin baik.

Demikian Laporan Kinerja Perangkat Daerah dibuat dengan melibatkan seluruh bagian dan bidang yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia semoga bermanfaat, namun disadari masih terdapat kekurangan-kekurangan maupun kelemahannya oleh karena itu saran dan perbaikan perlu dilakukan.



Nanga Bulik, Januari 2024

Kepala BKPSDM Kabupaten Lamandau,

KAMINI ANTHUS

Pembina Utama Muda

NIP. 19800612 200312 1 007

LAMPIRAN

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2023

PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN

[illegible]

PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA



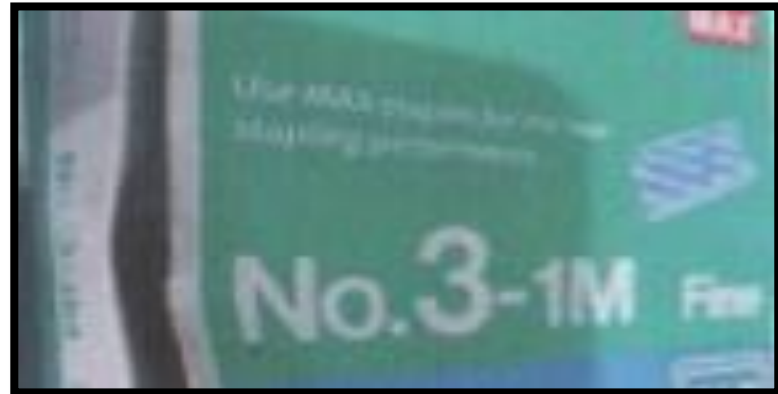
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR



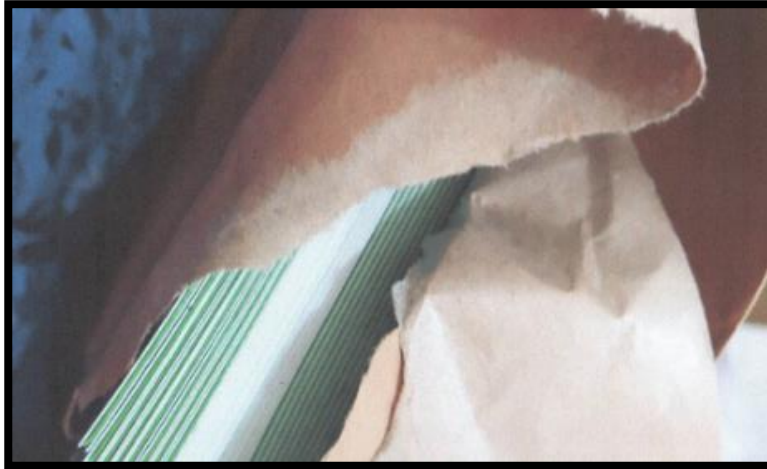
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR



PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR



PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN



PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



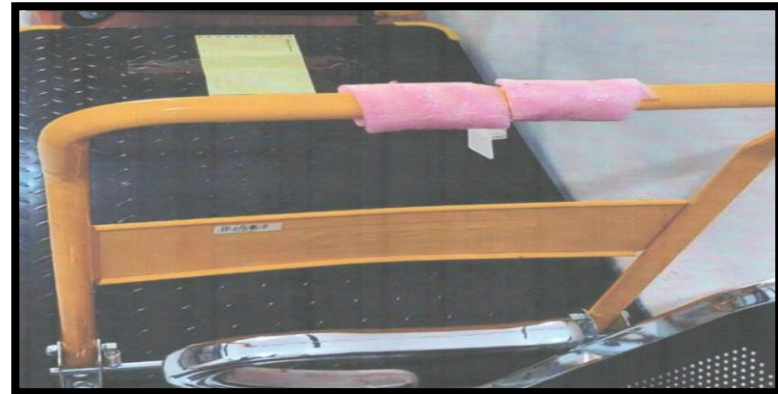
PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD



PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA



PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA



PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

		A	B	C	D	E	F	G	H	I
			Tanggal Minta Nomor Surat	Tanggal SPT	Nomor SPT	Tanggal SPPD	Nomor SPPD	Nama	Tujuan	Perihal
1	09-01-2023			841.5/011/Bkpsdm-2023		094/011/Bkpsdm-2023		Abdi Dharma Saputra, SH	Jakarta	Pengurusan dan Penyempitan Daftar i Satyailancana karyasatya Periode Nov
2	09-01-2023			841.5/021/Bkpsdm-2023		094/021/Bkpsdm-2023		Merry Afranto, S.Kom, Agus Sutrisno, S.kom, Praptomo, S.E	Banjartara	Koordinasi dan konsultasi format peny dan Penilaian Kinerja bag PNS Tupes PERMENPAN RB nomor 6 TAHUN 202 Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin
3	10-01-2023			841.5/031/Bkpsdm-2023				KAMINI ANTHUS, TIRARADI, S.T.M.Si	Jakarta	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Pimpinan Tinggi Pratama serta menyany pelaksanaan Pelaksanaan dan Penguatan Pegabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lin Kabupaten Lamandau ke Komisi Apara
4	10-01-2023			841.5/041/Bkpsdm-2023		094/041/Bkpsdm-2023		KAMINI ANTHUS	Semarang	Menghadiri kegiatan Konsinyering Perti Keuangan TA. 2022
5	10-01-2023			841.5/051/Bkpsdm-2023		094/051/Bkpsdm-2023		WAKAN SUSILA PAKERTI, S.E, TAAT NING, S.AP, WIRAWATI, A.MJ RISKA AULIA	Semarang	Mengikuti kegiatan Konsinyering Perti TA. 2022
6	10-01-2023			841.5/061/Bkpsdm-2023		094/061/Bkpsdm-2023		KIKI, S.H	Pangkalan Bun	Memfasilitasi dan mengantar kepala Ba
7	10-01-2023			841.5/071/Bkpsdm-2023		094/071/Bkpsdm-2023		KIKI, S.H	Pangkalan Bun	Menjemput Kepala Badan di Bandaran
8	16-01-2023			841.5/081/Bkpsdm-2023		094/081/Bkpsdm-2023		MARKARIUS A.Md, RINALDO KRISTANTO AJANG	Banjartara	Koordinasi terkait kenaikan pangkat me SASN ke Kantor Regional VIII Badan K

		A	B	C	D	E	F
			Timestamp	Tanggal Surat	Nomor Surat	Perihal	Tujuan Surat
1	02/01/2023				814.1/011/Bkpsdm 2023	Surat Perjanjian Kerja (SPK)	Hans Junianto Tanneke, S.E
2	02/01/2023				814.1/021/Bkpsdm 2023	Surat Perjanjian Kerja (SPK)	Kiki, S.H
3	02/01/2023				814.1/031/Bkpsdm 2023	Surat Perjanjian Kerja (SPK)	M.Prassetyo agung Dharma Wino,S.Pd
4	02/01/2023				814.1/041/Bkpsdm 2023	Surat Perjanjian Kerja (SPK)	Manda Ariane, S.Kom
5	02/01/2023				814.1/051/Bkpsdm 2023	Surat Perjanjian Kerja (SPK)	Swedlia Tri, S.Sos
6	02/01/2023				814.1/061/Bkpsdm 2023	Surat Perjanjian Kerja (SPK)	Yuliana Teraminta
7	02/01/2023				814.1/071/Bkpsdm 2023	Surat Perjanjian Kerja (SPK)	Eva Rath
8	02/01/2023				814.1/081/Bkpsdm 2023	Surat Perjanjian Kerja (SPK)	Alya Diah Larasati
9	02/01/2023				814.1/091/Bkpsdm 2023	Surat Perjanjian Kerja (SPK)	Riska Aulia
10	02/01/2023				814.1/101/Bkpsdm 2023	Surat Perjanjian Kerja (SPK)	M.Safuan
11	02/01/2023				814.1/111/Bkpsdm 2023	Surat Perjanjian Kerja (SPK)	Apri Manandar
12	02/01/2023				814.1/121/Bkpsdm 2023	Surat Perjanjian Kerja (SPK)	Sri Rahayu
13	02/01/2023				814.1/131/Bkpsdm 2023	Surat Perjanjian Kerja (SPK)	Marimon
14	02/01/2023				814.1/141/Bkpsdm 2023	Surat Perjanjian Kerja (SPK)	Helda
15	02/01/2023				814.1/151/Bkpsdm 2023	Surat Perjanjian Kerja (SPK)	Saidi
16	02/01/2023				800/16/Bkpsdm/1/2023	SK, PPK	Tira
17	02/01/2023					SK, PPTK	
18	02/01/2023						
19	02/01/2023					SK, Pejabat Pengadaan	
20	02/01/2023					SK, Bendahara PPTK	

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

PT. POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Tpc. Nongabelik 74162

532994365

TANDA TERIMA
POM KAB. LAMANDAU

Tanggal : 13-11-2023 12:55:04
No. Resi : 74162-33/2023/826262 Petugas : 55000/573

NO. SAMPULAN : 9901454
NAMA : KANTOR BOP
ALAMAT : JL. HR SUPRATMAN KELUHAN BULIK, NANGA BULIK
TARIF : 1. INSTANSI PTL/THL/POUR/IAS
PERIODE : Oktober 2023 RENCANA PENYAWAIAN AIR
STAN : 10042-10902 0a - 10 m : 10x4.400 = 44.000
PEMAYATAN : 60 11a - 20 m : 10x5.300 = 53.000
HARGA AIR : Rp. 333.000 21a - 30 m : 10x5.900 = 59.000
ADMINISTRASI : Rp. 8.000 30a > - : 30x5.900 = 177.000
BENDA : Rp. 0
TOTAL TAGIHAN : Rp. 341.000
ADMIN POS : Rp. 5.000
TOTAL BAYAR : Rp. 346.000

KANTOR POS POS INDONESIA

HP/MP : 011-001-630-2-055-000 a.u. PT Pos Indonesia
Lokasi status : http://www.posindonesia.co.id

PT. PLN (PERSERO) UIR KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH
UP3 PALANGKA RAYA
ULP NANGA BULIK PLN

DAFTAR INFORMASI TAGIHAN LISTRIK
BULAN NOVEMBER 2023

PLN (PERSERO) ULP NANGA BULIK
AN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN LAMANDAU

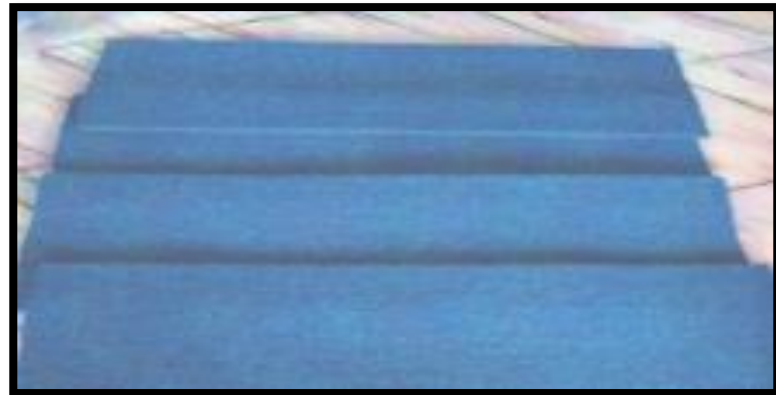
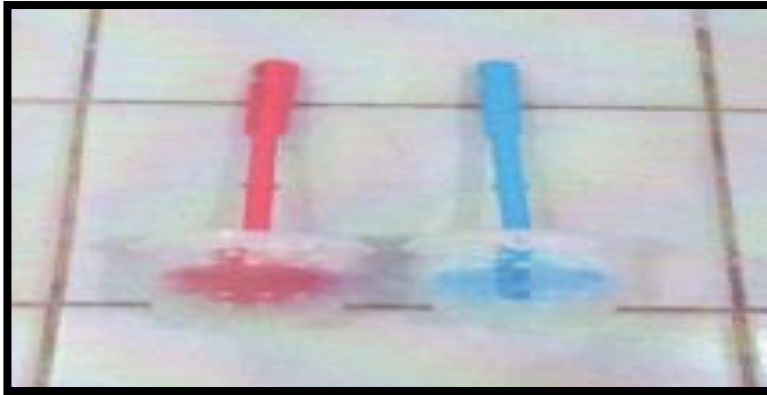
NAMA PELANGGAN	ID PEL	TARIF	DAYA	PEM KWH	PTL Rp	TAGIHAN Rp	PPN Rp	TKRATO Rp	MAT Rp	BK Rp	KOGOL
KEPEGAWAIAN DAERAH	224700015146	P1	33.000	3.948	6.709.744	6.719.744	0	0	10.000	0	3
RD LAMANDAU	224700023800	P1	23.000	920	1.563.568	1.563.568	0	0	0	0	3
RD BARU BOP	224600057180	P1	10.600	1.183	2.027.539	2.027.539	0	0	0	0	3
JUMLAH				6.061	10.300.851	10.310.851	0	0	10.000	0	

DI ATAS BELUM TERMASUK BIAYA ADM BANK
KINASI PEMBAYARAN (WA HUMAS PLN : 08115197016)

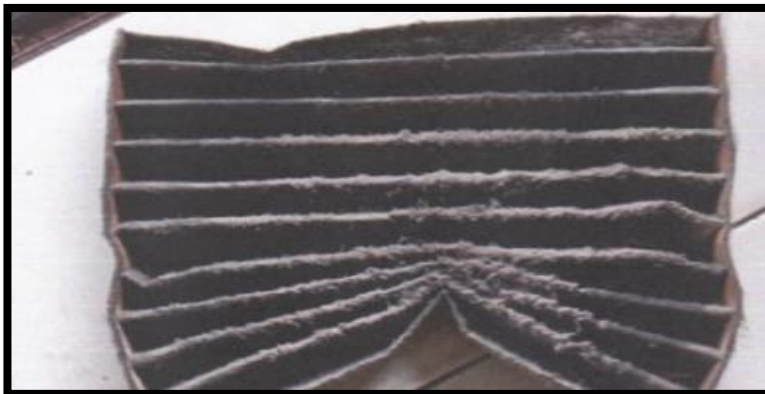
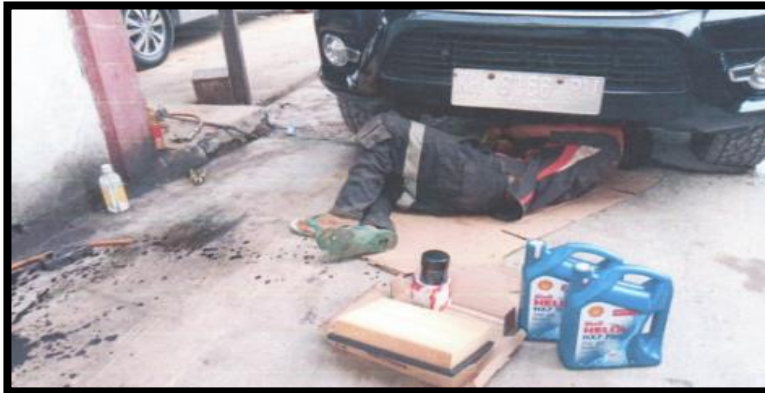
SUPERVISOR PP & ADM
BRIAN ABDI WICAKSONO

NANGA BULIK, 08 NOVEMBER 2023
MENGETAHUI,
MANAGER
TAUFIK AKBAR

PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR



**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**



PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA



PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA



**PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR
ATAU BANGUNAN LAINNYA**



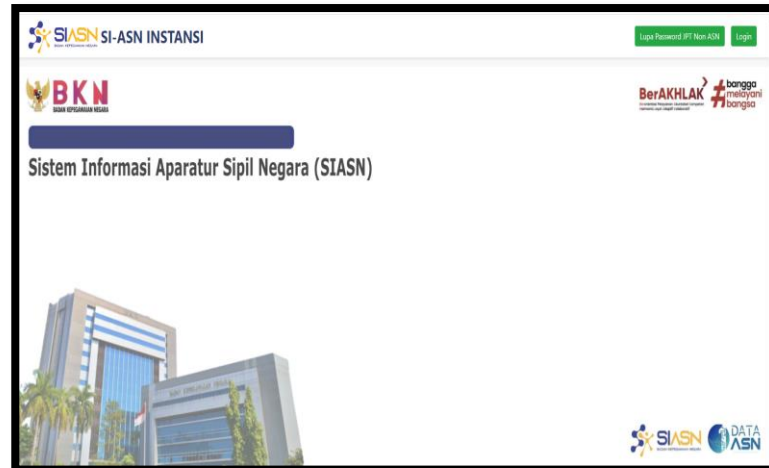
PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN, JENIS DAN JUMLAH JABATAN UNTUK PELAKSANAAN PENGADAAN ASN



PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN



PENGELOLAAN MUTASI ASN



PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN



PENGELOLAAN PROMOSI ASN



PENGELOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN ASN



PELAKSANAAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR



PENGELOLAAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN



PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS



SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL

